



NO KATALOG BPS : 21010

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN TENGAH

2010



Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010

Katalog BPS : 21010
No. ISSN : 0854.7076
No. Publikasi : 62521.0308

Naskah :
Bidang Statistik Sosial
BPS Propinsi Kalimantan Tengah

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial
BPS Propinsi Kalimantan Tengah

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik
Propinsi Kalimantan Tengah

"Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya"

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 ini adalah merupakan publikasi rutin setiap tahun yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Kalimantan Tengah. Publikasi ini menyajikan perkembangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, yang mencakup berbagai ragam informasi/indikator tentang perubahan dan pencapaian perkembangan taraf kesejahteraan di Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga hal ini dapat diketahui dari waktu ke waktu.

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman dari pengolahan beberapa data yang bersumber dari BPS maupun luar BPS (data sekunder). Adapun bidang-bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup antara lain Kependudukan dan KB, Pendidikan, Kesehatan/Gizi, Konsumsi, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Lingkungan Hidup.

Diharapkan publikasi ini dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam penentuan kebijakan maupun penelitian atau analisis data. Kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari lengkap dan sempurna, sehingga kritik dan saran untuk penyempurnaan edisi berikutnya sangat diharapkan.

Palangka Raya, Agustus 2010

**Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi
Kalimantan Tengah**

WS Dantes Simbolon, MA
NIP. 19540311 197703 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Sistematika Penyusunan Indikator	1
1.4. Sumber Data dan Indikator	2
BAB II KEPENDUDUKAN	3
2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Komposisi Penduduk	3
2.2. Keluarga Berencana	7
2.3. Proyeksi Jumlah Penduduk	8
BAB III MOBILITAS PENDUDUK	10
3.1. Distribusi Penduduk	10
3.2. Tingkat Perpindahan Penduduk	12
BAB IV PENDIDIKAN	14
4.1. Penduduk Usia Sekolah	14
4.2. Keadaan Sarana Pendidikan	15
4.3. Angka Buta Huruf	16
4.4. Partisipasi Sekolah	17
4.5. Pendidikan Yang Ditamatkan	19
BAB V SOSIAL BUDAYA	22
5.1. Akses ke Media Masa	22
5.2. Sarana Budaya	24
BAB VI KESEHATAN	25
6.1. Anak Lahir Hidup	25
6.2. Angka Kematian Bayi	27
6.3. Angka Harapan Hidup	28
6.4. Sarana dan Prasarana Kesehatan	29
6.5. Fasilitas Kesehatan dan Cara Berobat	30
6.6. Status Kesehatan dan Gizi	33
BAB VII KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA	36
7.1. Pengeluaran Rata – rata Per Kapita	36
BAB VIII KETENAGAKERJAAN	39
8.1. Penduduk Usia Kerja	39
8.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	40
8.3. Lapangan Pekerjaan	42
8.4. Status dan Jenis Pekerjaan	43
8.5. Jam Kerja	44
BAB IX KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	45
BAB X PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	46
10.1. Berbagai Unsur Rumah/Tempat Tinggal	47
10.2. Fasilitas Perumahan	52
BAB XI KEMISKINAN	57
11.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan	57
11.2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	59

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1.	Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1980 – 2009	4
Tabel 2.2.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2000, 2008 dan 2009	4
Tabel 2.3.	Komposisi Umur Penduduk dan Angka Ketergantungan Tahun 1990 – 2009	5
Tabel 2.4.	Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2008 dan 2009	7
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk wanita 15-49 Tahun yg berstatus Kawin Menurut Kelompok Umur dan Alat /Cara KB yg Sedang Digunakan Tahun 2009	8
Tabel 2.6.	Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2011 (x 1000)	9
Tabel 3.1.	Kepadatan Penduduk Menurut Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2009	11
Tabel 4.1.	Persentase Penduduk berumur 10 – 44 Tahun yang Buta Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 1999 – 2009	17
Tabel 4.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2004-2009	18
Tabel 4.3.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2007 – 2009	20
Tabel 4.4.	Persentase Penduduk Kalimantan tengah Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2009	21
Tabel 5.1.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Akses Ke Media Massa Tahun 2007 – 2009	23
Tabel 5.2.	Banyaknya Pengunjung dan Uang Masuk Ke Museum Balanga Tahun 2009	24
Tabel 6.1.	Rata – Rata Anak Yang Pernah Dilahirkan Hidup Menurut Kelompok Umur Ibu dan Kabupaten/Kota Tahun 2009	26
Tabel 6.2.	Persentase Anak – anak menurut Wilayah Tempat Tinggal dan keluhan Utama yang Dialami selama sebulan yang lalu, Tahun 2009.....	29
Tabel 6.3.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kalimantan Tengah Tahun 2000-2009	30
Tabel 6.4.	Persentase Kunjungan Penduduk ke Pelayanan Kesehatan, Menurut Tempat Pelayanan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2009	31
Tabel 6.5.	Angka Kunjungan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009	31
Tabel 6.6.	Persentase Penolong Persalinan Balita Tahun 2009	32
Tabel 6.7.	Persentase Penduduk Sakit Dengan Pengobatan Sendiri Menurut kabupaten/Kota Tahun 2009	33
Tabel 6.8.	Rata – rata Lama Sakit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009	34
Tabel 6.9.	Konsumsi Kalori, Protein dan Lemak Perkapita Sehari Menurut Asal Bahan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 1990 – 2003	35
Tabel 7.1.	Pengeluaran Rata – rata Perkapita Sebulan Tahun 1999 – 2007 (rupiah)	36
Tabel 7.2.	Pengeluaran Rata – rata Perkapita Sebulan Untuk Bahan Makanan Tahun 2005-2009 (rupiah)	38
Tabel 7.3.	Pengeluaran Rata – rata Perkapita Sebulan Untuk Bahan Non Makanan Tahun 2005-2009 (rupiah)	38
Tabel 8.1.	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin Februari 2010	39

Tabel 8.2.	Persentase TPAK TKK dan Pengangguran terbuka Tahun 2008-2010	41
Tabel 8.4.	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2009-2010	42
Tabel 8.5.	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2009-2010	43
Tabel 8.6.	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Tahun 2010	44
Tabel 9.1.	Isi Lembaga Pemasarakatan (LP) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2009	45
Tabel 9.2.	Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Diterima dan Diselesaikan Privinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2009	45
Tabel 10.1.	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, Tahun 2009	47
Tabel 10.2.	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Rumah Yang dikuasai Tahun 2003 – 2009	48
Tabel 10.3.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah Terluas Tahun 2002 – 2009	49
Tabel 10.4.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Tahun 2001-2009	50
Tabel 10.5.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah Terluas Tahun 2003 – 2009	51
Tabel 10.6.	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Air Minum Tahun 2003-2009	52
Tabel 10.7.	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Yang dipergunakan Tahun 2003-2009	53
Tabel 10.8.	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Tahun 2002 – 2009	53
Tabel 10.9.	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air Besar Tahun 2002 – 2009	54
Tabel 10.10.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset Tahun 2002 – 2009	55
Tabel 10.11.	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Tinja Tahun 2009	55
Tabel 10.12.	Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar/Energi Yang Digunakan Untuk memasak Tahun 2009	56
Tabel 11.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tahun 2000 – 2010	57
Tabel 11.2.	Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tahun 2005 – 2010 ...	58
Tabel 11.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Menurut Daerah tahun 2005 – 2010	59

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1. Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2000 dan 2009	6
Gambar 2.2. Persentase Penduduk wanita 15-49 Tahun yg berstatus Kawin Menurut Kelompok Umur da Alat /Cara KB yg Sedang Digunakan Tahun 2009	8
Gambar 4.1. Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Tingkat Sekolah Tahun 2007 dan 2009	15
Gambar 4.2. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2009	21
Gambar 6.1. Rata – Rata Anak Yang Pernah Dilahirkan Hidup Menurut Kelompok Umur Ibu Tahun 2008 dan 2009	26
Gambar 6.2. Angka kematian Bayi (AKB) Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990 – 2008	28
Gambar 6.3. Angka Harapan Hidup (e_0) Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990 – 2008	28
Gambar 8.1. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Tahun 2009	40
Gambar 8.2. TPAK Kalimantan Tengah Tahun 2008-2010	41
Gambar 8.3. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010	43
Gambar 10.1. Persentase Penguasaan Tempat Tinggal, Menurut Daerah Tahun 2009	48
Gambar 10.2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah Terluas Tahun 2009	49
Gambar 10.3. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Tahun 2009	50
Gambar 10.4. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah Terluas Tahun 2009	51
Gambar 10.5. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset Tahun 2009	55
Gambar 10.6. Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar/Energi Yang Digunakan Untuk memasak Tahun 2009	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah kesejahteraan yang tercantum dalam dokumen resmi negara seperti UUD 1945, sebenarnya mempunyai makna dan pengertian yang sangat luas. Kesejahteraan tidak saja menyangkut aspek yang bersifat lahiriah atau material tetapi juga bersifat batiniah atau spiritual. Sedemikian luasnya aspek-aspek yang tercantum dalam istilah tersebut sehingga data statistik yang konvensional, seperti pendapatan per kapita sangatlah tidak memadai untuk menampung makna kesejahteraan yang dimaksud. Meningkatkan pendapatan per kapita sudah tentu merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi hal demikian belum memadai untuk membangun manusia seutuhnya, suatu istilah yang tercantum dalam dokumen resmi negara, yang secara jelas menggambarkan luasnya muatan kesejahteraan.

Pada aspek yang begitu luas sangat tidak mungkin untuk menyajikan data statistik yang mampu mengukur segi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu statistik atau indikator yang disajikan dalam terbitan ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*). Untuk itu kerangka, kajian yang bertujuan untuk menilai berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan perlu dilakukan. Disamping itu kajian ini perlu juga mempelajari hambatan dan kendala yang mungkin ada selama pelaksanaan pembangunan berlangsung. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sosial tersebut, sangat diperlukan adanya data/indikator yang bisa memberikan gambaran tentang taraf pemerataan dan perkembangan kesejahteraan rakyat sebagai dampak pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator-indikator yang disajikan merupakan indikator hasil (keadaan sosial) atau dampak (*output or impact indicators*) yang menggambarkan pengaruh atau dampak langsung dari pembangunan. Hal ini perlu disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan ukuran untuk menilai derajat kesejahteraan yang telah dicapai selama ini, juga rangkuman data/informasi yang terkandung di dalamnya bisa dijadikan bahan penyusunan perencanaan pembangunan dimasa mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 ini untuk memberikan gambaran yang jelas secara statistik dan berkesinambungan dalam pelaksanaan program pembangunan, yang pada gilirannya dapat dijadikan bahan/kerangka perumusan kebijaksanaan dan program-program pengembangan/ peningkatan di bidang kesejahteraan rakyat.

1.3. Sistematika Penyusunan Indikator

Inkesra Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 terdiri dari 8 kelompok indikator sektoral yaitu Kependudukan, Kesehatan/Gizi, Pendidikan, Konsumsi dan Pengeluaran rumah tangga, Ketenagakerjaan, Perumahan serta Sosial Budaya. Ringkasan indikator sektoral disajikan untuk menggambarkan secara garis besar keadaan, tingkat dan perkembangan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, Inkesra 2010 ini juga membahas tingkat

keterkaitan dan keterbandingan antar kabupaten/kota dengan mempergunakan tabel-tabel dan gambar/grafik. Untuk maksud tersebut diatas, buku ini terbagi ke dalam 11 (sebelas) bab seperti berikut :

Bab	I. Pendahuluan
Bab	II. Kependudukan
Bab	III. Mobilitas Penduduk
Bab	IV. Pendidikan
Bab	V. Sosial Budaya
Bab	VI. Kesehatan
Bab	VII. Konsumsi dan Pengeluaran
Bab	VIII. Ketenagakerjaan
Bab	IX. Keamana dan Ketertiban Masyarakat
Bab	X. Perumahan dan Lingkungan Hidup
Bab	XI. Kemiskinan

1.4. Sumber Data dan Indikator

Sumber data publikasi Inkesra Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 adalah Sensus Penduduk (SP), Servei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan data sekunder atau data yang berasal dari luar BPS.

BAB II KEPENDUDUKAN

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan, yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, tidak saja menjadi pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan. Untuk itu perhatian pemerintah terhadap masalah kependudukan selama ini telah diwujudkan dalam berbagai bentuk program, baik berorientasi langsung terhadap faktor-faktor demografi maupun yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tanggap terhadap masalah penting yang dihadapi oleh bangsa kita ini.

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sebagai dampak atau efek dari setiap pembangunan menyebabkan terjadinya perubahan masalah kependudukan, seperti turunnya fertilitas sebagai hasil upaya keras pemerintah melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang menyebabkan pertumbuhan penduduk pada kelompok anak-anak dapat ditekan. Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya pelayanan kesehatan menyebabkan menurunnya tingkat kematian dan makin tingginya peluang penduduk berumur lebih panjang. Disamping itu, globalisasi ekonomi, budaya dan komunikasi memberikan pengaruh pada mobilitas penduduk baik yang sifatnya permanen maupun sementara.

Data demografi dewasa ini semakin banyak diperlukan oleh berbagai pihak sebagai data pendukung, input dan output dari suatu kegiatan. Aspek kependudukan yang akan dibahas pada publikasi ini adalah besaran, komposisi, perubahan dan persebaran serta karakteristik baik dari kuantitas maupun kualitas.

2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, Struktur dan Komposisi Penduduk

Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2009 adalah 2.183.668 jiwa yang terdiri dari penduduk perempuan 1.064.156 jiwa (48,73 persen) dan 1.119.512 jiwa (51,27 persen) penduduk laki-laki (Registrasi Penduduk Akhir 2009). Dengan penduduk yang besar tersebut maka apabila didukung oleh kualitas yang memadai maka penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah akan merupakan potensi dan sekaligus modal bagi pembangunan.

Selama dasa warsa 1980 - 1990 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah meningkat cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 3,88 persen, lebih besar dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional (1,97 persen). Namun demikian pertumbuhan tersebut kini secara berangsur menurun pada periode 1990-1995 yaitu 2,79 persen, dan ini turun menjadi 2,01 persen pada periode 1995 – 2000 dan pada tahun 2000 – 2006 turun menjadi 1,23 persen. Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab dan usaha keras pemerintah dalam menekan angka kelahiran melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), serta meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya pelayanan kesehatan.

Tabel 2.1 : Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1980 - 2009

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (%)
(1)	(2)	(3)
1980	954	-
1990	1.396	3,88 (1980-1990)
1995	1.692	2,79 (1990-1995)
2000	1.801	2,01(1995-2000)
2006	1.937	1,23 (2000-2006)
2007	2.047	3,21 (2007-2008)
2008	2.132	2,38 (2008-2009)
2009	2.184	

Sumber BPS. SP1980,1990,2000, Supas 1995 dan Susenas 2006, RPA 2009

Tabel 2.2 : Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2000, 2008, dan 2009

Kelompok Umur	2000			2008			2009		
	LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	10,91	11,33	11,10	9,28	9,07	9,18	9,19	8,85	9,02
5 - 9	11,33	11,49	11,41	10,78	11,17	10,97	11,35	11,47	11,41
10 - 14	10,82	10,97	10,89	10,77	10,41	10,59	10,29	10,77	10,53
15 - 19	10,47	11,30	10,87	10,31	9,84	10,08	9,57	9,39	9,48
20 - 24	9,70	11,33	10,49	7,51	8,91	8,19	7,57	8,55	8,05
25 - 29	10,17	10,70	10,43	8,70	9,84	8,26	8,87	9,62	9,23
30 - 34	8,71	8,24	8,48	8,34	8,61	8,47	8,01	8,54	8,27
35 - 39	7,83	7,41	7,63	8,29	8,38	8,33	8,76	8,57	8,67
40 - 44	6,12	5,24	5,69	6,87	6,34	6,61	7,04	6,54	6,80
45 - 49	4,38	3,71	4,05	5,68	5,42	5,55	5,74	5,43	5,59
50 - 54	3,20	2,71	2,97	4,59	4,22	4,41	4,85	4,39	4,63
55 - 59	2,05	1,80	1,93	2,89	2,48	2,69	3,25	2,77	3,01
60 - 64	1,97	1,60	1,73	2,39	2,04	2,22	2,11	2,00	2,06
65 - 69	0,82	0,89	0,93	1,38	1,40	1,39	1,40	1,23	1,31
70 - 74	0,64	0,62	0,76	1,05	0,89	0,97	0,93	1,02	0,97
75+	0,64	0,62	0,63	1,17	1,00	1,08	1,06	0,87	0,97
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : SP 1990, SP 2000, dan Registrasi Penduduk 2009

Perkembangan struktur umur penduduk ditentukan oleh adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi serta norma-norma hidup masyarakat. Sebagai contoh, turunnya angka kelahiran (fertilitas) sebagai hasil upaya keras pemerintah melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) menyebabkan pertumbuhan penduduk

pada kelompok anak-anak dapat dikendalikan. Membaiknya derajat kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya pelayanan kesehatan menyebabkan semakin tinggi angka harapan hidup. Di samping itu, globalisasi mempercepat pengaruh pada mobilitas penduduk baik yang bersifat permanen maupun sementara.

Dari aspek kependudukan atau demografi jelas terlihat dari perkembangan atau pergeseran struktur penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 1990 s/d 2009 seperti terlihat pada Tabel 2.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 1990 – 2009, persentase penduduk laki-laki pada kelompok umur 25 – 44 tahun (usia produktif) cenderung meningkat tajam, yaitu dari $\pm 27,87$ persen di tahun 1990 menjadi $\pm 32,68$ persen di tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk laki-laki yang umumnya datang dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai migran. Mereka biasanya merupakan tenaga kerja musiman atau rantauan yang belum kawin dan bekerja di industri pengolahan kayu, penebangan hutan, proyek-proyek bangunan dan lain sebagainya. Untuk sebagian dari mereka yang sudah berstatus kawin, mereka meninggalkan keluarga mereka yang masih bertempat tinggal atau menetap di Provinsi sebelumnya.

Komposisi penduduk menurut umur Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1990 digolongkan penduduk muda seperti terjadi di hampir provinsi-provinsi di Indonesia, lebih dari 40 persen penduduk adalah berumur dibawah 15 tahun. Namun persentase ini dalam kurun waktu antara 1990 – 2005 secara perlahan-lahan menurun terus dari sebesar 47,15 persen ditahun 1980 dan 41,24 persen pada tahun 1990. Selama kurun waktu tahun 2000 dan 2009 terjadi penurunan lebih tajam, yaitu menjadi 33,40 persen di tahun 2000 dan 30,96 persen pada tahun 2009. Penurunan ini lebih disebabkan karena keberhasilan KB yang pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak tahun 1980 an. Turunnya persentase penduduk kelompok anak-anak ini secara fungsional menaikkan persentase penduduk pada kelompok lebih tua, sebagai contoh usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 1990 sebesar 56,39 persen menjadi 65,79 persen pada tahun 2009 (Tabel 2.3).

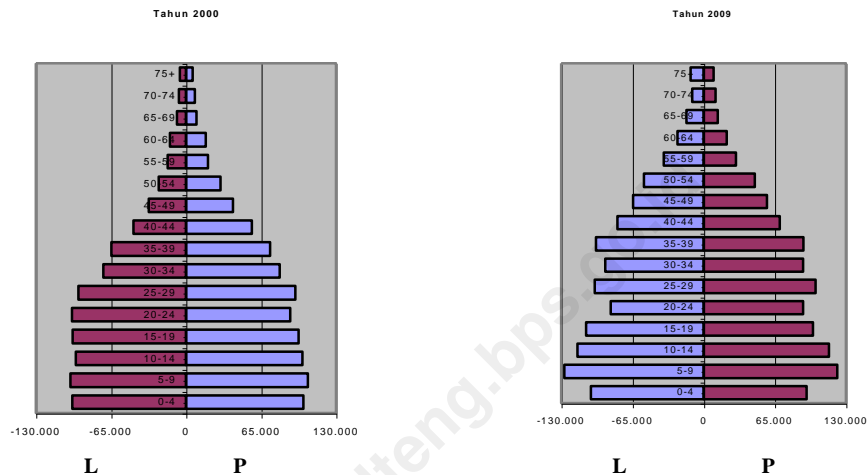
Tabel 2.3. Komposisi Umur Penduduk dan Angka Ketergantungan Tahun 1990 – 2009

Tahun	Umur			Jumlah	Angka Beban Ketergantungan
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1990	41,23	56,39	2,38	100,00	77,34
1995	36,34	61,66	2,00	100,00	62,18
2000	33,40	64,28	2,32	100,00	55,57
2001	34,45	64,18	2,10	100,00	56,95
2002	33,28	64,31	2,41	100,00	55,50
2003	32,96	64,32	2,12	100,00	54,54
2004	32,62	64,85	2,52	100,00	54,19
2005	32,45	65,15	2,40	100,00	53,49
2006	31,35	65,82	2,83	100,00	51,93
2007	32,46	64,32	3,21	100,00	55,47
2008	30,74	65,82	3,44	100,00	51,94
2009	30,96	65,79	3,25	100,00	52,01

Sumber : SP 1990, 2000; Supas 1995; Susenas 2001-2009

Dengan komposisi umur penduduk seperti yang terlihat pada Tabel 2.3 angka beban tanggungan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 77 pada tahun 1990 dan menurun menjadi 52 pada tahun 2009, yang berarti setiap sejumlah 100 penduduk usia produktif harus menanggung 52 penduduk usia non produktif (usia anak-anak dan penduduk usia lanjut). Angka beban tanggungan sebesar 55 tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka nasional (50). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kelahiran dan kematian di Provinsi Kalimantan Tengah masih cukup tinggi.

Gambar 2.1 : Piramida Penduduk menurut Jenis Kelamin, Tahun 2000 dan 2009



Sumber : SP2000, Susenas 2009

Perubahan struktur umur penduduk dari tahun 2000 ke 2009 tergambar pada piramida penduduk pada Gambar 2.1. Dari gambar tersebut terlihat bahwa bentuk piramida dari tahun 2000 ke 2009 mengalami sedikit perubahan, dimana masih terlihat melebar di dasar piramida, sedangkan di bagian tengah piramida makin melebar dan merata dan bagian atas piramida yang cenderung semakin menyempit meruncing tajam. Dari analisis piramida menggambarkan bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2000 tergolong penduduk muda (seperti dihampir semua Provinsi di seluruh Indonesia) dan tahun 2009 tergolong penduduk muda kearah menengah, hususnya pada kelompok umur penduduk tua pada piramida penduduk, menunjukkan bahwa penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa Rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 2000 – 2009 sedikit mengalami perubahan, yaitu sebesar 107 pada tahun 2000 menjadi 105 pada tahun 2009 (setiap 100 penduduk perempuan ada 105 penduduk laki-laki). Bila dilihat dari ketiga kelompok umur, yaitu anak-anak, muda dan tua, menunjukkan rasio jenis kelamin diatas 100.

Tabel 2.4 : Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, Tahun 2008 dan 2009

Kelompok Umur	2008			2009		
	Laki-laki	Perempuan	Sex Rasio	Laki-laki	Perempuan	Sex Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	100.473	95.736	105	102.929	94.147	109
5 - 9	116.923	117.462	100	127.094	122.074	104
10 - 14	116.395	109.529	106	115.226	114.610	101
15 - 19	111.402	103.125	108	107.099	99.879	107
20 - 24	81.459	93.342	87	84.798	90.938	93
25 - 29	94.393	103.910	91	99.273	102.322	97
30 - 34	90.309	90.288	100	89.699	90.930	99
35 - 39	90.034	88.246	102	98.055	91.219	107
40 - 44	74.235	66.307	112	78.784	69.630	113
45 - 49	61.349	56.682	108	64.283	57.823	111
50 - 54	49.662	44.077	113	54.351	46.712	116
55 - 59	31.152	25.894	120	36.347	29.488	123
60 - 64	25.987	21.223	122	23.672	21.246	111
65 - 69	14.936	14.365	104	15.629	13.053	120
70 - 74	11.414	9.305	123	10.367	10.874	95
75+	12.628	10.594	119	11.906	9.211	129
Jumlah	1.082.752	1.050.086	103	1.119.512	1.064.156	105

Sumber : Registrasi Penduduk 2008, 2009 Provinsi Kalimantan Tengah

2.2 Keluarga Berencana (KB)

Sasaran program KB adalah bukan hanya ditujukan kepada pencapaian jumlah peserta KB saja, tetapi juga agar terciptanya kondisi peserta tersebut dapat terus menerus secara aktif menggunakan cara/alat KB. Dengan demikian meningkatnya jumlah peserta KB harus diikuti pula dengan berbagai upaya untuk meningkatkan peserta KB aktif, sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap penurunan fertilitas.

Tabel 2.5 menunjukkan presentase penduduk wanita 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut kelompok umur dan alat/cara KB yang sedang digunakan tahun 2009 yang menggambarkan :

1. Proporsi Peserta KB aktif

Penduduk pada kelompok umur 25-39 tahun merupakan persentase pemakaian alat KB-nya terbesar (68,21 persen), sedangkan terkecil adalah untuk kelompok umur 15-19. Hal ini mungkin disebabkan wanita pada kelompok umur tersebut sangat berkeinginan mempunyai keturunan.

2. Proporsi peserta KB menurut umur dan pemakaian pil KB

Dari sejumlah pemakai alat kontrasepsi, maka terdapat 40,72 persen menggunakan pil KB, sedang sisanya alat kontrasepsi yang lain. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh adanya sasaran dari program itu sendiri, dan juga karena lebih praktis dan kemudahan pelayanan bagi para pengguna.

3. Pemakaian IUD menurut umur

Proporsi besarnya pemakaian IUD adalah sangat rendah (1,28 persen), padahal IUD merupakan salah satu alat yang efektif, karena tingkat kelangsungan pemakaian IUD adalah paling tinggi dibandingkan pil atau

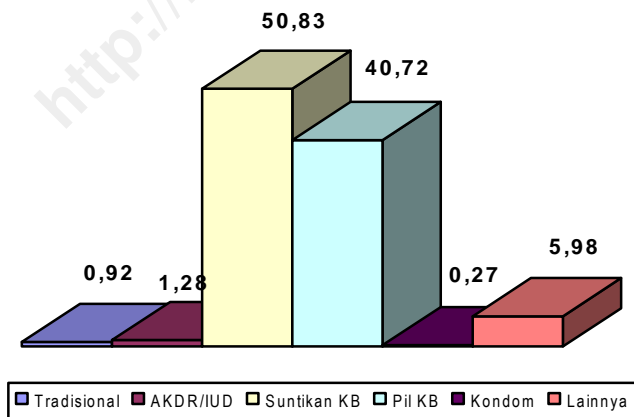
kondom. Diharapkan dengan pemakaian IUD akan lebih menjamin keberhasilan program KB. Rendahnya tingkat pemakaian IUD tersebut terjadi pada semua kelompok umur, bahkan pada kelompok umur 15-19 tahun tidak ada yang menggunakan alat tersebut.

Tabel 2.5 : Presentase Penduduk Wanita 15-49 th yang Berstatus Kawin Menurut Kelompok Umur dan Alat/cara KB yang Sedang Digunakan Tahun 2009

Kelompok Umur	Alat/cara KB yang digunakan						Jumlah
	Tradisional	AKDR/IUD	Suntikan KB	Pil KB	Kondom	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15-19	0,00	0,00	1,38	0,82	0,00	0,07	2,27
20-24	0,02	0,09	7,31	5,12	0,03	0,45	13,01
25-29	0,10	0,04	12,61	8,81	0,03	0,80	22,39
30-34	0,12	0,17	10,41	9,06	0,04	1,39	21,19
35-39	0,30	0,43	10,12	8,13	0,09	1,65	20,73
40-44	0,18	0,19	6,03	5,89	0,06	1,02	13,37
45-49	0,19	0,35	2,98	2,90	0,02	0,61	7,05
Jumlah	0,92	1,28	50,83	40,72	0,27	5,98	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2009 Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Cara/Alat KB yg digunakan, Tahun 2009



2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk tingkat provinsi. Oleh karena itu naik turunnya jumlah penduduk kabupaten/kota selama periode proyeksi tergantung pula pada kenaikan/penurunan penduduk provinsi.

Dari hasil proyeksi penduduk kabupaten/kota (2008 – 2010) menunjukkan bahwa penduduk Kalimantan Tengah lima tahun mendatang akan bertambah menjadi 2,196 juta jiwa, walaupun dengan tingkat pertumbuhan rendah yaitu sebesar 1,23 persen yaitu antara tahun 2000 - 2006 (Tabel 2.6). Pertumbuhan penduduk sebelumnya pada tahun 1995 - 2000 yaitu 2,01 persen. Turunnya laju pertumbuhan penduduk ini lebih disebabkan karena turunnya tingkat kelahiran yang lebih cepat bila dibandingkan dengan penurunan tingkat kematian.

Tabel 2.6. Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2011 (X 1000)

No.	Kabupaten/Kota	T a h u n			
		2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
1	Kotawaringin Barat	211,1	214,1	216,9	219,7
2.	Kotawaringin Timur	325,4	239,9	334,3	338,7
3.	Kapuas	362,5	367,5	372,5	377,3
4.	Barito Selatan	125,7	127,4	129,1	130,8
5.	Barito Utara	117,8	119,5	121,0	122,6
6.	Sukamara	38,1	38,7	39,2	39,7
7.	Lamandau	57,2	58,0	58,8	59,5
8.	Seruyan	110,0	111,5	113,0	114,5
9	Katingan	136,4	138,3	140,2	142,0
10.	Pulang Pisau	120,3	122,0	123,6	125,2
11.	Gunung Mas	89,4	90,7	91,9	93,1
12.	Barito Timur	87,0	88,2	89,4	90,6
13.	Murung Raya	89,5	90,8	92,0	93,2
14.	Palangka Raya	186,7	189,3	191,8	194,3
Kalimantan Tengah		2.057,3	2.085,8	2.113,8	2.141,2

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk (Supas 2005)

BAB III MOBILITAS PENDUDUK

3.1. Distribusi Penduduk

3.1.1 Tingkat Kepadatan Penduduk Antar Wilayah (*Population Density*)

Secara administratif-pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi 119 kecamatan dan 1.448 desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2009 persebaran penduduk Propinsi Kalimantan Tengah masih belum merata. Hal ini akibat kurangnya sarana jalan darat yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain, sehingga penduduk lebih banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Dengan berfungsinya sungai sebagai sarana transportasi perhubungan untuk semua kegiatan masyarakat, maka daerah-daerah sepanjang aliran sungai menjadi daerah pemukiman penduduk. Daerah-daerah yang jauh dari aliran sungai jarang dihuni oleh penduduk, meskipun kadang kala daerah tersebut merupakan daerah potensial untuk pertanian, industri, pertambangan dan lain sebagainya.

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 kepadatan penduduk Propinsi Kalimantan Tengah adalah 14 jiwa per Km². Angka ini meningkat pesat dibanding kondisi tahun 1990 dimana kepadatan penduduk Propinsi Kalimantan Tengah hanya 9 jiwa per Km². Dengan adanya modernisasi banyak memberikan pengaruh pada mobilitas penduduk baik yang sifatnya permanen maupun sementara, sehingga pada tahun 2009 kepadatan penduduk Propinsi Kalimantan Tengah meningkat pesat. Khusus di Kota Palangka Raya yang luas wilayahnya kurang dari 2 persen dari luas Propinsi Kalimantan Tengah (± 2400 Km²) mempunyai kepadatan penduduk hampir lebih dari 5 kali kepadatan penduduk Propinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 75 jiwa per Km². Bila dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Murung Raya yang merupakan kabupaten terluas dengan luas $\pm 1/5$ luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah kepadatan penduduknya paling jarang, yaitu sebesar 4 jiwa per Km². Untuk kabupaten-kabupaten induk seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara dan Kota Palangka Raya masing-masing 24 jiwa, 20 jiwa, 23 jiwa, 14 jiwa, 15 jiwa dan 75 jiwa per Km². (Tabel 3.1)

Secara umum pola persebaran penduduk menurut tempat tinggal di Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2009 antara daerah perkotaan dan perdesaan sangat mencolok perbedaannya (Tabel 3.1). Dari tabel menunjukkan bahwa penduduk yang bermukim di daerah perkotaan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daerah perdesaan, yaitu hanya 34,00 persen penduduk yang tinggal di perkotaan, sedangkan 66,00 persen lainnya tinggal di perdesaan.

Khusus persebaran penduduk di Kota Palangka Raya yang merupakan ibu kota propinsi, penduduk tinggal di daerah perkotaan sebesar 87,67 persen, sedangkan 12,33 persen bertempat tinggal di daerah perdesaan. Hal ini bertolak belakang dengan Kabupaten Murung Raya, yang mana persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan hanya 11,55 persen, yang paling kecil di Propinsi Kalimantan Tengah sedangkan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan adalah 88,45 persen, mereka bekerja di sektor pertanian.

Tabel 3.1 : Kepadatan Penduduk menurut Wilayah Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Persebaran	
				Perkotaan	Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kotawaringin Barat	10.759	258.767	24	55,22	44,78
2. Kotawaringin Timur	16.496	328.817	20	37,04	62,96
3. Kapuas	14.999	339.824	23	19,89	80,11
4. Barito Selatan	8.830	127.058	14	28,84	71,16
5. Barito Utara	8.300	122.776	15	35,00	65,00
6. Sukamara	3.827	43.253	11	19,38	80,62
7. Lamandau	6.414	63.079	10	13,99	86,01
8. Seruyan	16.404	137.012	8	21,84	78,16
9. Katingan	17.800	148.912	8	21,39	78,61
10. Pulang Pisau	8.997	122.542	14	17,19	82,81
11. Gunung Mas	10.804	97.898	9	22,67	77,33
12. Barito Timur	3.834	93.898	24	26,60	73,40
13. Murung Raya	23.700	98.834	4	11,55	88,45
14. Palangkaraya	2.400	200.998	75	87,67	12,33
Kalteng	153.564	2.183.668	14	34,00	66,00

Sumber : BPS, Registrasi Penduduk dan Susenas 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain dengan melampaui batas administratif. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi, misalnya peningkatan taraf hidup, ketidakmerataan atau ketimpangan persebaran jumlah penduduk, berkurangnya sumber daya alam, menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, adanya tekanan atau diskriminasi politik, bencana alam, kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Ketimpangan pembangunan baik fisik maupun mental, akan mendorong keinginan penduduk untuk pindah menjadi tinggi. Arus perpindahan penduduk biasanya bergerak dari daerah yang agak terbelakang pembangunannya ke daerah yang lebih maju, sehingga daerah yang sudah padat menjadi semakin padat, karena biasanya daerah yang sudah maju lebih padat penduduknya. Disamping itu ada juga daerah-daerah yang penduduknya mempunyai perilaku atau kebiasaan pindah ke daerah lain atau lebih sering disebut merantau. Daerah tersebut adalah Sumatera Barat dengan suku Minangkabau, Sulawesi Selatan dengan suku Bugisnya dan Sumatera Utara dengan suku Bataknya.

Sejak tahun 1994, dengan membaiknya prasarana perhubungan (darat, laut dan udara), seperti prasarana perhubungan jalan darat yang menghubungkan antara beberapa kota antara lain Sampit, Pangkalan Bun, dan Kuala Kapuas sudah cukup baik, sehingga mobilitas penduduk semakin cepat dan ramai. Disamping itu perbedaan persebaran penduduk di Indonesia terutama terjadinya kelebihan penduduk di Pulau Jawa dan kekurangan penduduk di luar Pulau Jawa, oleh pemerintah telah dilakukan program pemindahan penduduk ke luar Pulau Jawa.

Dari uraian-uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa perpindahan penduduk antar wilayah sudah sejak lama terjadi. Volume dan arus perpindahan penduduk semakin meningkat sejalan dengan derap pembangunan yang ada. Peningkatan perpindahan penduduk jelas akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam bahasan ini akan di ketahui kecenderungan dan pola perpindahan tersebut. Ini disampaikan terbatas hanya sampai tingkat propinsi saja, karena data dan informasi yang tersedia.

3.2.. Tingkat Perpindahan Penduduk

3.2.1 Migrasi Lima Tahun Yang Lalu (Migrasi Risen)

Migrasi lima tahun yang lalu atau sering disebut migrasi risen pada sub bab ini dibedakan menurut migrasi risen masuk dan migrasi risen keluar. Jumlah pendatang yang masuk ke Kalimantan Tengah pada tahun 2009 diperkirakan 40.482 orang yang kalau diperinci menurut pulau daerah asalnya, maka pendatang asal Pulau Jawa merupakan jumlah yang terbesar. Mereka ini datang ke Kalimantan Tengah sejak perang kemerdekaan dan sejak saat itu pula arus migrasi yang masuk semakin membesar. Hal ini disebabkan adanya jaringan sanak famili atau teman yang bertempat tinggal lebih dulu di Kalimantan Tengah. Fenomena ini didalam demografi dikenal sebagai migrasi berantai (*chain migration*). Disamping hal-hal tersebut, jarak antara Kalimantan Tengah dengan Pulau Jawa yang relatif cukup dekat, sehingga ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap intensitas migrasi. Lagi pula perkembangan sarana transportasi yang semakin lancar dan meningkat dewasa ini seakan-akan memperpendek jarak antara kedua pulau tersebut. Selain Pulau Jawa, asal migran dengan jumlah terbesar kedua adalah Pulau Kalimantan sendiri (tanpa Propinsi Kalimantan Tengah) dengan jumlah migran lebih dari 40,00 persen.

3.2.2. Migrasi Keluar Lima Tahun Terakhir

Migrasi keluar dari Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2009, diperkirakan sebanyak 47.843 orang menuju propinsi tetangga. Dari jumlah tersebut sebagian besar menuju Propinsi Kalimantan Selatan, terutama ke Kota Banjarmasin yang banyak memberikan peluang untuk berbagai aspek kehidupan. Pulau Jawa sebagai daerah tujuan migrasi Kalimantan Tengah menduduki peringkat kedua dengan 22.721 orang migran. Kecenderungan migran memilih Pulau Jawa sebagai tempat tujuan dikarenakan Pulau Jawa mempunyai berbagai fasilitas lebih, sehingga ini memberikan peluang besar untuk berbagai aktivitas kehidupan. Hal lain yang menyebabkan besarnya migrasi keluar menuju Pulau Jawa adalah keterkaitan besarnya migrasi masuk yang berasal dari Pulau Jawa, termasuk penduduk transmigran, baik yang dikelola oleh pemerintah atau tidak, yang sebagian dari mereka kembali ke daerah asalnya. Pulau lain yang menjadi daerah tujuan para migran adalah Pulau Sumatera dan Sulawesi.

3.2.3. Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi) merupakan suatu faktor utama yang mendorong pesatnya pertumbuhan di daerah perkotaan. Ini dikarenakan di pedesaan, pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan pendapatan yang rendah sehingga memaksa mereka mencari nafkah ke perkotaan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal lain yang mendorong mereka pindah ke daerah perkotaan adalah : 1) industrialisasi di perkotaan sehingga ini akan menciptakan pendapatan lebih tinggi, serta kesempatan kerja yang lebih besar; 2) meskipun pertumbuhan penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan desa, namun populasi penduduk pedesaan masih tetap lebih besar dari pada penduduk perkotaan; 3) fasilitas baik sarana maupun prasarana di perkotaan relatif memadai, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, penerangan dan transportasi.

Pada tahun 1990 proporsi penduduk perkotaan sebesar 17,57 persen (302.196 orang) kemudian meningkat menjadi 20,32 persen (319.537) pada tahun 1995 dan meningkat lagi menjadi 34,00 persen pada tahun 2009. Hal ini akan berdampak kerawanan sosial, ekonomi dan politik sehingga akan menambah masalah bagi

pemerintah daerah. Dampak tersebut antara lain meningkatnya tindakan kriminalitas (pencurian, penganiayaan, mabuk-mabukan dan lain-lain) dan pemukiman kumuh.

Untuk mengatasi hal tersebut di daerah pedesaan harus diptakan lahan pertanian. Penebangan hutan secara liar dibatasi dengan memanfaatkan ladang-ladang yang ada secara intensif. Sumber-sumber daya dan tenaga kerja trampil harus disalurkan kedalam suatu usaha yang terus-menerus. Penempatan transmigran pada daerah yang dihubungkan dengan pemukiman terpencil. Pengembangan daerah pedesaan menjadi pusat produksi dan perekonomian, sehingga ini akan menjadi penyangga bagi daerah perkotaan serta membuka kesempatan kerja.

<http://kalteng.bps.go.id>

BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan menuju masyarakat dewasa dan mandiri, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Sejauh mana amanat yang tercermin dalam UUD 1945 dan GBHN, dimana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah atau sedang dicapai oleh masyarakat merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

Melalui pemerataan pendidikan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Dalam kaitan ini pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang disebut Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar) 9 tahun, yaitu sebuah kebijakan yang sangat mendasar dan diharapkan dapat menopang keberhasilan program pendidikan jangka panjang. Untuk menunjang perkembangan ekonomi melalui industrialisasi, tenaga kerja yang hanya berpendidikan SD saja tidak memadai, sehingga dengan Wajar 9 tahun berarti menunda anak-anak dan remaja untuk tidak segera terjun kelapangan kerja dan untuk lebih siap bekerja secara produktif. Selain itu diharapkan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah. Untuk menggambarkan keadaan pendidikan penduduk secara umum dalam uraian bagian ini, antara lain akan disajikan gambaran umum mengenai status pendidikan dari beberapa indikator seperti angka Partisipasi Sekolah Murni, Partisipasi Sekolah Kasar, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka melek huruf.

4.1. Penduduk Usia Sekolah

Komitmen Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa antara lain terlihat dari semakin meningkatnya jumlah sekolah yang dibangun, dan pengangkatan tenaga guru dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut agaknya merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah yang selalu meningkat terus sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Penduduk usia sekolah di Kalimantan Tengah pada tahun 2009 sebanyak 768.142 jiwa. Penyediaan dan pemerataan kesempatan belajar bagi penduduk usia sekolah perlu dipikirkan, disamping perlunya peningkatan mutu dan profesi tenaga pendidiknya. Program pendidikan dasar bertujuan untuk membina pendidikan pra sekolah pada Taman Kanak – kanak (TK), upaya penyediaan kesempatan belajar bagi anak berkelainan (SDLB dan SLB), dan sebagai pendidikan semua anak usia 7 – 12 tahun melalui pembinaan Sekolah Dasar (SD).

Upaya Pemerintah Daerah pada sektor pendidikan juga dilaksanakan dengan model Sistem SD Kecil dan Sistem Guru Kunjung di daerah terpencil atau pada kantong-kantong pemukiman yang tidak dapat diselenggarakan dengan SD konvensional. Peningkatan pembinaan bagi tamatan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (baik umum maupun kejuruan) untuk pengembangan kepribadian sesuai dengan perkembangan lingkungan dan pengembangan Sekolah Teknik Menengah Perkayuan seperti di Mandomai, yang masih langka keberadaannya di propinsi lain di Indonesia. Program pembinaan pendidikan tinggi bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli untuk mengisi jaringan teknostruktur masyarakat melalui pendidikan, penelitian dan karya ilmiah, informasi dan jasa dengan kelompok sasaran para tamatan SMTA.

Dikaitkan dengan struktur pembangunan lainnya seperti tenaga kerja, kesehatan dan lingkungan maka keberhasilan pendidikan dengan mutu yang baik akan memberikan dampak positif, misalnya sektor tenaga kerja, pendidikan dengan mutu yang baik setidaknya memberikan bekal pengetahuan dasar secara umum. Hal ini, akan mempermudah pengembangan keahlian selanjutnya oleh pihak tertentu atau Departemen Tenaga Kerja melalui kegiatan-kegiatan latihan di Balai Latihan Kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja.

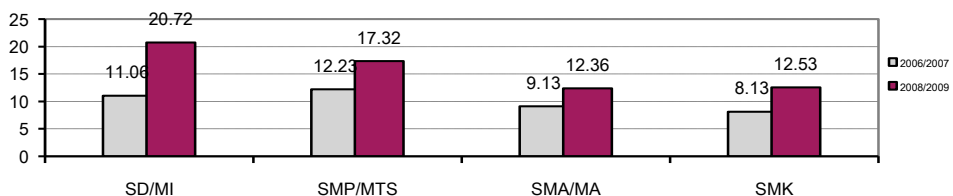
Dari Sektor Kesehatan dan Lingkungan misalnya, keberhasilan pendidikan dengan mutu yang baik, paling tidak setiap penduduk yang telah mengenyam pendidikan akan mengetahui prinsip dasar hidup sehat yang berwawasan lingkungan, demikian juga halnya pembangunan di sektor lain akan merasakan dampak positif dari hasil pembangunan pendidikan yang mutunya lebih baik. Sebaliknya apabila mutu pendidikan rendah atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Jadi peningkatan mutu pendidikan atau kualitas sumber daya manusia di Propinsi Kalimantan Tengah mutlak menjadi perhatian demi suksesnya pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya.

4.2. Keadaan Sarana Pendidikan

Rasio murid-guru dan murid-kelas merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pendidikan. Semakin kecil rasio, berarti semakin baik keadaan fasilitas pendidikan yang tersedia. Selain itu rasio murid-guru menggambarkan kepadatan kelas sebagai ruang belajar.

Sebagai gambaran umum, perkembangan prasarana dan sarana pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk jumlah sekolah, murid dan guru, serta rasio antara murid-sekolah, murid-guru, dan guru-sekolah pada tahun 2009 memperlihatkan adanya kenaikan secara kuantitas dan kualitas seperti terlihat pada Gambar 4.1. Pengadaan/pengangkatan guru secara umum dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibandingkan dengan peningkatan jumlah murid serta penambahan sekolah pada ke tiga jenjang pendidikan (SD, SLTP dan SLTA), yang semakin merata sampai ke pelosok pedesaan terutama di daerah terpencil dan kantong-kantong pemukiman yang terpencar. Oleh sebab itu jumlah sekolah yang ada dibandingkan dengan guru yang tersedia makin seimbang, khususnya daerah yang terpencil, sementara penambahan jumlah murid relatif meningkat, penambahan guru maupun jumlah sekolahnya juga bertambah. Rasio murid-guru pada masing-masing tingkatan sekolah pada tahun ajaran 2006/2007 adalah : SD = 11,06, SLTP = 12,23 dan SMA = 9,13, dan SMK = 8,13, pada tahun 2008/2009 menjadi SD = 20,72, SLTP = 17,32, SMA = 12,36 dan SMK = 12,53. Keadaan ini menggambarkan bahwa mutu pendidikan semakin ditingkatkan dengan menambah jumlah guru, terutama pada pendidikan dasar. Program wajib belajar 9 tahun juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai 9 tahun.

Gambar 4.1 : Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Tingkat Sekolah Tahun Ajaran 2006/2007 dan 2008/2009



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah

4.3. Angka Buta Huruf

Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah berusaha agar penduduk laki-laki maupun perempuan disegala lapisan masyarakat dapat terbebaskan dari buta aksara. Usaha pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar 9 tahun dan program kejar paket A dan B.

Dampak dari gerakan wajib belajar di tingkat dasar (penduduk usia 7-12 tahun) yang telah dilancarkan sejak 3 dasawarsa terakhir dapat terlihat melalui penurunan jumlah penduduk baik perkotaan maupun perdesaan yang tidak bisa baca tulis (Tabel 4.1). Dari profil angka buta huruf penduduk Propinsi Kalimantan Tengah selama tahun 1999-2009 diketahui bahwa persentase penduduk perempuan berumur 10-44 tahun yang buta huruf secara relatif lebih dari dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki baik di perdesaan maupun perkotaan, tetapi mulai tahun 2004 cenderung naik, ini berarti program pemberantasan buta huruf cukup berhasil, pada tahun 2009 untuk perkotaan + perdesaan mencapai 0,5 persen.

Pola atau kecenderungan umum persentase penduduk yang buta huruf di perdesaan dua kali lebih besar bila dibandingkan di perkotaan, baik untuk kelompok penduduk perempuan maupun laki-laki. Secara lengkap persentase penduduk Propinsi Kalimantan Tengah berumur 10-44 tahun yang buta huruf selama tahun 1999-2009, adalah perbandingan angka buta huruf di perkotaan dan perdesaan memperlihatkan pola yang tetap, yaitu angka buta huruf di perkotaan lebih rendah dari pada di perdesaan, yaitu misalnya pada tahun 2005 sebanyak 0,8 persen penduduk umur 10-44 tahun di perdesaan buta huruf, sedangkan di perkotaan hanya 0,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa disamping fasilitas pendidikan yang relatif lebih banyak, arah pembinaan pemberantasan buta huruf telah cukup berhasil mengingat dinamika masyarakat perkotaan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk dapat membaca dan menulis.

Tingginya angka buta huruf perempuan dibanding laki-laki di perdesaan selama empat tahun terakhir menunjukkan, bahwa jumlah perempuan di perdesaan yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan lebih banyak dibanding laki-laki dan lebih banyak dibanding di perkotaan. Penyebab dari keadaan ini diduga terkait dengan kemampuan ekonomi keluarga yang kurang memadai dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan di mana fasilitas yang tersedia berlokasi di tempat yang jauh dari jangkauan penduduk setempat.

Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat buta huruf penduduk Kalimantan Tengah sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat buta huruf penduduk perempuan yang lebih besar tersebut. Meskipun rendah, namun diferensiasi angka buta huruf laki-laki dan perempuan di atas memperlihatkan kesenjangan apakah sosial budaya maupun kesempatan antara kedua populasi itu masih ada.

Tabel 4.1 : Persentase Penduduk Berumur 10-44 Tahun yang Buta Huruf menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Tahun 1999-2009

Tahun	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Perempuan	Laki - laki	Total	Perempuan	Laki - laki	Total	Perempuan	Laki - laki	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1999	2,8	1,4	2,0	7,8	3,9	5,6	5,8	2,6	4,0
2000	2,5	1,4	1,9	8,5	3,5	5,5	5,2	2,5	4,3
2001	2,5	1,2	2,0	7,6	3,8	5,2	5,6	2,6	4,1
2004	0,7	0,4	0,6	1,3	0,6	0,9	1,1	0,5	0,8
2005	0,8	0,5	0,7	1,2	0,4	0,8	1,1	0,4	0,7
2006	1,6	0,8	1,2	1,5	1,0	1,2	1,5	0,9	1,2
2007	3,0	1,6	2,3	4,8	2,0	3,3	4,2	1,9	3,0
2008	1,5	1,4	1,4	2,1	1,7	1,9	1,9	1,6	1,7
2009	0,9	0,2	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5

Sumber: BPS, Susenas 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

Program pendidikan yang dilaksanakan di Propinsi Kalimantan Tengah telah mampu menurunkan angka buta huruf penduduk berumur 10-44 tahun selama kurun waktu tahun 1999-2009. Jika pada tahun 1999 persentase penduduk berumur 10-44 tahun yang buta huruf ada sebesar 4,0 persen maka pada tahun 2009 angka tersebut turun menjadi 0,5 persen. Dalam kurun waktu tersebut, penurunan yang lebih besar terjadi pada angka buta huruf perempuan dibandingkan laki-laki, yakni untuk perempuan turun dari 5,8 persen pada tahun 1999 menjadi 0,6 persen pada tahun 2009, sedangkan untuk laki-laki turun dari 2,6 persen pada tahun 1999 menjadi 0,4 persen pada tahun 2009.

Dari gambaran yang dikemukakan di atas kiranya jelas bahwa perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk pemberantasan buta huruf di Propinsi Kalimantan Tengah, dan upaya tersebut perlu diprioritaskan pada penduduk perempuan khususnya di daerah perdesaan. Hal ini mengingat bahwa akselerasi pemberantasan buta huruf masih berjalan cukup lambat walaupun ini telah dilancarkan sejak satu dasawarsa terakhir.

4.4. Partisipasi Sekolah

Pengkajian partisipasi sekolah penduduk Kalimantan Tengah pada setiap jenjang pendidikan (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah), diharapkan akan dapat memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia yang potensial di masa datang. Dalam hal ini, salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan adalah GER (*Gross Enrollment Ratio*), berdasarkan data Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Definisi GER adalah penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk usia sekolah yang bersangkutan.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tingkat partisipasi sekolah penduduk Kalimantan Tengah telah meningkat, baik perempuan maupun laki-laki. Keadaan ini cukup menggembirakan karena partisipasi sekolah memang diharapkan dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Peningkatan penduduk yang bersekolah selama tahun 2004-2009 merupakan keberhasilan Propinsi Kalimantan Tengah dalam upaya memperluas pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah penduduk di Propinsi Kalimantan Tengah yang cenderung semakin meningkat. Selama kurun waktu tersebut, Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan dan laki-laki usia SD (7-12 tahun) dan usia SLTP (13-15 tahun) relatif sama. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan di Propinsi Kalimantan Tengah telah mendapat kesempatan yang sama untuk duduk di bangku pendidikan dasar. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur dan jenis kelamin selama tahun 2004-2009 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Perbandingan antara kelompok usia penduduk tingkat pendidikan tampak bahwa APS anak usia tingkat pendidikan SD (7-12 tahun) lebih tinggi dibandingkan APS usia SLTP (13-15 tahun). Pada tahun 2004 APS usia SD mencapai 98,42 persen dan APS usia SLTP sebesar 88,41 persen. APS usia penduduk tingkat pendidikan SLTP yang lebih rendah dibanding APS usia SD dapat dimengerti karena pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah baru berjalan sekitar 6 tahun, sehingga belum meliputi seluruh anak usia 13-15 tahun yang ada.

Tabel 4.2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2004-2009

Kelompok Umur / Jenis Kelamin	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>7-12 tahun</i>						
- Perempuan	98,25	96,49	98,70	98,51	98,55	98,28
- Laki-laki	98,57	97,40	97,98	97,96	98,30	98,71
- Total	98,42	96,96	98,33	98,23	98,43	98,50
<i>13-15 tahun</i>						
- Perempuan	86,73	88,86	88,73	88,36	88,61	88,72
- Laki-laki	89,99	83,96	83,79	83,89	84,03	84,52
- Total	88,41	86,28	86,08	86,14	86,19	86,62
<i>16-18 tahun</i>						
- Perempuan	50,48	51,33	57,10	56,48	56,44	53,99
- Laki-laki	50,22	52,22	50,11	50,18	50,02	53,50
- Total	50,35	51,77	53,39	53,20	53,01	53,73
<i>19-24 tahun</i>						
- Perempuan	7,61	9,67	8,90	9,36	9,04	10,06
- Laki-laki	8,61	9,67	9,74	10,14	9,91	10,13
- Total	8,12	9,67	9,32	9,75	9,46	10,09

Sumber: BPS, Susenas 2004 - 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

Partisipasi sekolah penduduk perempuan usia tingkat pendidikan SLTA (16-18 tahun) selama tahun 2004-2009 pun menunjukkan gambaran yang menggembirakan. Jika pada tahun 2004 APS penduduk perempuan sebesar 50,48 persen atau lebih tinggi dibanding laki-laki (50,22 persen), namun pada tahun-tahun berikutnya tidak menunjukkan peningkatan yang berarti yaitu tahun 2009 mencapai 53,99 persen masih lebih tinggi dibanding peningkatan penduduk laki-laki (53,50 persen). Hal tersebut diatas juga terjadi pada kelompok usia penduduk tingkat pendidikan tinggi (19-24 tahun), APS penduduk perempuan mengalami peningkatan dari pada kaum laki-laki, yaitu dari 7,61 persen tahun 2004 menjadi 10,06 persen tahun 2009 dan APS untuk laki-laki adalah 8,61 persen naik menjadi 10,13 persen (Tabel 4.2). Fenomena ini menunjukkan masih adanya peranan perempuan dalam kesetaraan gender di bidang pendidikan.

Secara umum, tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan selama sepuluh tahun terakhir. Demikian pula partisipasi sekolah baik pada laki-laki maupun perempuan.

4.5. Pendidikan Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kemajuan yang dicapai oleh suatu bangsa antara lain sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya. Berkaitan dengan hal ini, penting untuk diketahui perkembangan jumlah penduduk Kalimantan tengah terutama dari tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan.

Peningkatan persentase perempuan berpendidikan menengah dan tinggi merupakan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di Propinsi Kalimantan Tengah, khususnya di daerah perkotaan (Tabel 4.3). Persentase penduduk perempuan berpendidikan SLTP dan SLTA ke atas di perkotaan jauh lebih besar dibanding di perdesaan baik pada tahun 2007 maupun tahun 2009, meskipun jika dibandingkan dengan laki-laki masih lebih rendah. Selama tahun 2007 – 2009, secara nyata telah terjadi peningkatan jumlah perempuan berpendidikan SD, SLTP dan SLTA keatas, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di sisi lain, persentase perempuan berusia 10 tahun ke atas yang tidak atau belum sekolah serta yang tidak/belum lulus SD semakin berkurang. Kecenderungan serupa juga dijumpai pada laki-laki di perdesaan dan perkotaan, dengan persentase perubahan yang relatif sama.

Tabel 4.3 : Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 s/d 2007

Daerah / Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2007		2008		2009	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Perkotaan</i>						
Tdk/blm pernah sekolah	3,48	1,35	3,11	1,13	3,21	1,18
Tdk/blm tamat SD	17,43	15,11	17,40	15,79	17,97	15,12
Tamat SD	25,29	22,56	27,01	26,53	24,25	22,22
Tamat SLTP	21,01	21,72	18,84	19,54	18,63	19,92
Tamat SLTA +	32,80	39,26	33,64	37,01	35,93	41,56
<i>Perdesaan</i>						
Tdk/blm pernah sekolah	5,13	2,36	4,84	2,4	4,73	2,05
Tdk/blm tamat SD	27,31	22,40	28,98	24,51	26,24	23,77
Tamat SD	39,54	39,49	38,15	39,17	39,30	39,16
Tamat SLTP	18,08	20,98	17,42	19,14	18,97	20,74
Tamat SLTA +	9,93	14,76	10,61	14,74	10,76	14,29
<i>Total</i>						
Tdk/blm pernah sekolah	4,65	2,06	4,23	2,00	4,20	1,75
Tdk/blm tamat SD	24,39	20,27	24,92	21,57	23,36	20,86
Tamat SD	35,34	34,54	34,23	34,91	34,06	33,46
Tamat SLTP	18,95	21,20	17,92	19,28	18,85	20,46
Tamat SLTA +	16,68	21,93	18,70	22,25	19,53	23,46

Sumber: BPS, Susenas 2007-2009 Propinsi Kalimantan Tengah

Peningkatan level pendidikan juga terjadi pada setiap jenis kelamin. Namun demikian, proporsi tingkat pendidikan masih lebih menguntungkan bagi laki-laki. Sebagai contoh, persentase penduduk yang berpendidikan rendah tahun 2007 masing-masing tercatat sebesar 56,87 persen laki-laki dan 64,38 persen perempuan, sedangkan untuk tahun 2009 menjadi 56,08 persen untuk penduduk laki-laki dan 61,62 persen untuk penduduk perempuan. Selanjutnya penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas) tercatat sebesar 21,93 persen laki-laki dan 16,68 persen perempuan pada tahun 2007. Pada tahun 2009, masing-masing naik menjadi 23,46 persen laki-laki dan 19,53 persen perempuan.

Pada jenjang pendidikan menengah, proporsi penduduk yang tamat sekolah lanjutan pertama maupun lanjutan atas ternyata memperlihatkan kenaikan. Pada tahun 2007, persentase penduduk yang tamat sekolah lanjutan atas mencapai 16,68 persen pada perempuan dan 21,93 persen pada laki-laki. Pada tahun 2009 persentase yang tamat sekolah lanjutan atas meningkat menjadi 19,53 persen pada perempuan dan 23,46 persen pada laki-laki. Kondisi seperti ini ada kecenderungan berkaitan dengan tingkat partisipasi sekolah pada pendidikan menengah pertama maupun menengah atas selama kurun waktu tersebut yang mengalami sedikit peningkatan.

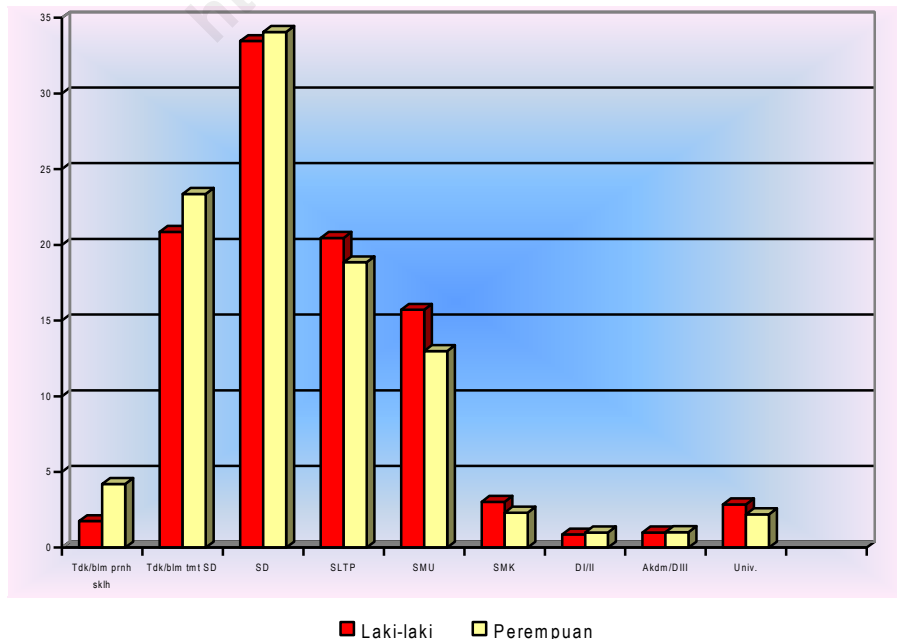
Tabel 4.4 menunjukkan Persentase Penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada kecenderungan pendidikan yang ditamatkan terfokus pada tingkat menengah (terutama pendidikan menengah pertama). Hal ini merupakan bukti keberhasilan Program Pemerintah tentang kebijakan pendidikan Wajar 9 tahun.

Tabel 4.4 : Persentase Penduduk Kalimantan Tengah Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 2009

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,75	4,20	2,95
Tidak/Belum Tamat SD	20,86	23,36	22,09
Sekolah Dasar	33,46	34,06	33,76
SMTP Umum/Sederajat	20,46	18,85	19,67
SMTA Umum	15,71	12,99	14,37
SMTA Kejuruan	3,02	2,31	2,67
Diploma I/II	0,87	1,00	0,94
Akademi/Diploma III	1,00	1,02	1,01
Universitas	2,86	2,21	2,54
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2009 BPS Propinsi Kalimantan Tengah

Gambar 4.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2009



BAB V SOSIAL BUDAYA

Kemajuan yang terjadi di dunia saat ini dirasakan amat pesat, sehingga seolah terjadi proses globalisasi dan menyebabkan penyebaran informasi semakin cepat dan memberikan kehidupan yang transparan. Keadaan ini dapat dirasakan dengan semakin gencarnya informasi ke segala pelosok dunia baik melalui media elektronik seperti radio, dan televisi, maupun melalui media cetak seperti surat kabar atau majalah. Arus informasi yang terus mengalir sepanjang waktu akan membawa dampak positif maupun negatif. Dari segi positif adalah membuka cakrawala pemikiran seseorang sehingga lebih terbuka dan dewasa, serta informasi tersebut sangat berguna bagi pembangunan dirinya terutama bagi penduduk yang tergolong dewasa atau yang berumur 10 tahun ke atas. Sebagai efek negatif dia akan merusak budaya serta tradisi yang sudah dilestarikan masyarakat setempat.

Harus diakui bahwa aktivitas masyarakat dalam menerima informasi melalui radio, televisi dan surat kabar sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarannya. Di daerah perkotaan radio bukannya merupakan barang yang mahal, sehingga aktivitas mendengarkan radio suatu hal yang biasa dilakukan. Selain radio, televisi juga sangat umum dimiliki masyarakat, sehingga merupakan salah satu media elektronik yang cukup diminati. Sedangkan surat kabar meskipun merupakan sumber informasi yang baik, masih terasa mahal dan sangat dipengaruhi oleh penyebarannya.

Secara umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat telah terjadi. Ini dapat tercermin adanya pergeseran komposisi atau pola pemanfaatan waktu, dimana elastisitas penggunaan waktu untuk mencari nafkah pada umumnya rendah, sedangkan pemanfaatan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan sosial budaya umumnya semakin tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang penggunaan waktu untuk mencari nafkah sudah mencapai titik jenuh, sehingga penggunaan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan sosial budaya telah meningkat.

Sosial budaya merupakan salah satu aspek kesejahteraan yang luas cakupannya, diantaranya adalah akses pada informasi dan hiburan, kegiatan yang mengandung corak sosial dan budaya, perjalanan wisata serta upaya kesejahteraan sosial.

5.1. Akses Ke Media Massa

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengkonsumsi media elektronik maupun media cetak tercatat cukup tinggi. Konsumsi media elektronik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang mendengarkan radio, menonton acara televisi (TV) dan membaca surat kabar atau majalah. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan informal karena orang yang turut mencermati informasi yang digelar media massa dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan cakrawala berfikirnya. Tabel 4.1 menyajikan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut akses ke media massa dan jenis kelamin selama tahun 2007 - 2009.

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa persentase penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar/majalah mengalami kenaikan selama tahun 2007-2009. Pada tahun 2009 terdapat 93,8 persen penduduk yang menonton TV; 79,2 persen mendengarkan radio; dan 47,1 persen membaca surat kabar/majalah, sedangkan pada tahun 2007 persentasenya adalah berturut-turut 93,6 persen, 79,0

persen dan 46,1 persen. Tampak bahwa akses ke media massa TV paling banyak dibandingkan akses ke media lain, baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan, yakni mencapai 93,9 persen (perempuan) dan 93,6 persen (laki-laki) Sedangkan penduduk yang mendengarkan radio tidak lebih dari 80 persen, yaitu 79,2 persen (untuk perempuan adalah 78,2 persen dan laki-laki adalah 81,2 persen). Bila dilihat penduduk yang membaca majalah/surat kabar masing-masing 42,8 persen (perempuan) dan 50,4 persen (laki-laki). Tingginya persentase penduduk yang menonton televisi disebabkan antara lain karena jaringan televisi telah menjangkau hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah, ditunjang oleh telah masuknya instalasi listrik ke seluruh desa. Di samping itu, TV merupakan sarana hiburan yang menyediakan acara menarik yang mudah diserap, termasuk oleh penduduk terutama mereka yang berpendidikan rendah, menonton TV juga tidak memerlukan keahlian membaca dan menulis. Film-film telenovela yang banyak ditayangkan di sejumlah stasiun televisi mungkin menjadi salah satu tayangan yang banyak diminati oleh perempuan di Propinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 5.1 : Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Ke Atas Menurut Akses Ke Media Massa, Tahun 2007-2009

Akses ke Media Massa / Tahun	2007	2008	2009
(1)	(3)	(4)	(4)
<i>Mendengar radio</i>			
- Perempuan	77,4	77,8	78,2
- Laki-laki	80,6	80,9	81,2
- Total	79,0	79,1	79,2
<i>Menonton TV</i>			
- Perempuan	93,7	93,8	93,9
- Laki-laki	93,5	93,5	93,6
- Total	93,6	93,7	93,8
<i>Membaca majalah</i>			
- Perempuan	42,6	42,6	42,8
- Laki-laki	49,4	49,9	50,4
- Total	46,1	46,6	47,1

Akses penduduk perempuan pada media massa, baik radio, TV ataupun surat kabar/majalah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Data tahun 2009 memperlihatkan adanya perbedaan (*gap*) tingkat aksesibilitas antara perempuan dan laki-laki pada media massa. Perbedaan terbesar terjadi dalam kelompok akses pada surat kabar, diikuti akses pada radio dan TV. Pada kurun waktu 2007-2009 terjadi peningkatan akses penduduk laki-laki maupun perempuan di Propinsi Kalimantan Tengah pada televisi, radio dan surat kabar. Di antara ketiga jenis media massa di atas, akses ke surat kabar adalah yang terendah baik oleh perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan perkiraan, rendahnya akses masyarakat pada surat kabar/majalah, terutama disebabkan masih rendahnya budaya membaca di masyarakat, terutama di perdesaan. Selain itu, harga surat kabar yang memang relatif cukup mahal dan peredarannya yang masih terbatas sehingga diperkirakan belum dapat mencapai seluruh daerah.

5.2. Sarana Budaya

Bidang pariwisata mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian kita, baik sebagai sumber penghasilan daerah maupun kesempatan kerja dan kesempatan usaha, terlebih bagi penduduk setempat. Sarana budaya seperti tempat wisata, bioskop, dan museum merupakan sarana tempat mengadakan rekreasi maupun sarana untuk kunjungan wisata.

Kabupaten/Kota yang memiliki taman hiburan/tempat rekreasi adalah : Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Kota Palangka Raya. Khusus untuk museum hanya ada di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2009 tercatat sebanyak 5227 orang (termasuk orang asing) yang mengunjungi museum Balanga di Palangka Raya, dengan jumlah uang yang masuk sebesar Rp. 13.398.500,-. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2009 (sebanyak 2.183.668 jiwa), terlihat bahwa jumlah penduduk yang mengunjungi museum relatif kecil.

Tabel 5.2 : Banyaknya Pengunjung Dan Uang Masuk Ke Museum Balanga, Palangka Raya Tahun 2009

No	Bulan	Banyaknya Pengunjung			Uang Masuk (Rp)
		Yang Membayar	Yang Tidak Membayar	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Januari	1 302	0	1 302	2 604 000
2.	Pebruari	1 497	0	1 497	3 742 500
3.	Maret	721	0	721	2 523 500
4.	April	248	0	248	860 000
5.	Mei	254	0	254	254 000
6.	Juni	318	0	318	310 000
7.	Juli	120	0	120	420 000
8.	Agustus	280	0	280	980 000
9.	September	190	0	190	665 000
10.	Oktober	101	0	101	353 500
11.	Nopember	109	0	109	381 500
12.	Desember	87	0	87	304 500
Jumlah		5227	0	5227	13 398 500

Sumber : Museum Balanga Provinsi Kalimantan Tengah 2009

BAB VI KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Dengan masyarakat yang memiliki tingkat derajat kesehatan tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakannya dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang penghasilan rendah. Usaha yang sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan polindes. Oleh karena itu pembangunan di bidang kesehatan yang sedang digiatkan ini diharapkan dapat berakselerasi positif.

Upaya kesehatan di Propinsi Kalimantan Tengah sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu dalam penanganan faktor-faktor tersebut harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan khususnya di bidang kesehatan, berikut ini disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesehatan dan gizi, pemanfaatan fasilitas kesehatan, status kesehatan dan gizi, dan indikator penunjang lainnya, begitu juga hasil yang telah dicapai akan diuraikan pada bab ini.

6.1 Anak Lahir Hidup

Bayi dan balita merupakan golongan masyarakat yang dianggap paling rawan dari aspek kesehatan. Indikator yang berkaitan dengan kesakitan dan kematian bayi merupakan indikator penting dan sering dipakai untuk mengukur kemajuan suatu daerah, khususnya kemajuan bidang kesehatan. Hal ini dimaksudkan bahwa kesejahteraan bayi/balita sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dimana orang tuanya bertempat tinggal serta tingkat sosial ekonomi orang tua tersebut. Untuk itu ada yang berpendapat bahwa taraf hidup kesehatan bayi/balita adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Hal ini dimungkinkan karena bagaimanapun juga anak-anak adalah generasi penerus sehingga ini merupakan sumber daya manusia guna menunjang pembangunan di masa mendatang.

Anak Lahir Hidup (ALH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah kelahiran hidup dari sekelompok penduduk perempuan selama masa reproduksinya. Pengaruh umur pada paritas ALH mencerminkan pola hubungan yang positif, artinya, semakin tinggi umur perempuan, semakin banyak anak yang dimiliki, karena masa kemungkinan hamil semakin panjang (*time of exposure to risk*). Hubungan ini selain mencerminkan hubungan proses pembentukan keluarga, dapat juga memperlihatkan proses perubahan fertilitas antar waktu. Untuk paritas Kalimantan Tengah pertambahan rata rata jumlah anak dari masing-masing kelompok umur menyerupai garis linear.

Tabel 6.1 disajikan data rata-rata anak yang pernah dilahirkan menurut kelompok umur ibu tahun 2009. ALH kelompok umur muda (15-19) tahun merupakan angka yang terendah dari kelompok umur lainnya, yaitu sebesar 0,40 di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Murung Raya. Dari ALH kabupaten/kota

memperlihatkan bahwa ALH tertinggi terdapat di Kabupaten Gunung Mas yaitu 2,50. Bila ditinjau dari kelompok umur, maka untuk kelompok umur tua (usia 45 - 49) tahun, hampir semua kabupaten/kota mempunyai ALH cukup tinggi. Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai ALH tertinggi tercatat pada kelompok umur 45-49 tahun, yaitu sebesar 4,42.

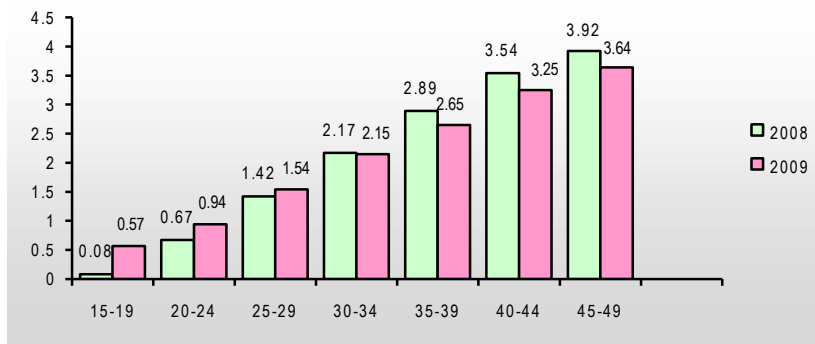
Tabel 6.1 : Rata-rata Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup menurutKelompok Umur Ibu dan Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/ Kota	Kelompok Umur							Jumlah
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kobar	0,40	0,77	1,53	2,09	2,43	3,14	3,53	2,18
Kotim	0,66	1,07	1,59	2,34	2,86	3,11	4,42	2,44
Kapuas	0,57	0,87	1,52	2,03	2,71	3,28	3,74	2,30
Barsel	0,56	0,93	1,61	2,23	2,43	3,70	3,36	2,25
Barut	0,77	1,09	1,50	2,01	2,36	3,16	2,95	2,11
Sukamara	0,75	1,00	1,58	2,32	2,88	3,68	3,93	2,45
Lamandau	0,83	1,03	1,48	2,13	2,46	2,95	2,59	2,06
Seruyan	0,58	1,05	1,63	2,04	2,62	3,19	3,62	2,30
Katingan	0,63	0,92	1,66	2,15	2,67	3,41	3,13	2,17
Pulang Pisau	0,43	0,87	1,59	2,20	2,90	3,54	3,72	2,39
Gunung Mas	0,60	1,11	1,70	2,44	3,27	3,54	4,16	2,50
Bartim	0,54	0,90	1,35	1,87	2,53	3,01	3,25	2,12
Mura	0,40	1,02	1,45	2,41	2,48	2,99	3,51	2,16
P. Raya	0,43	0,78	1,36	2,11	2,63	3,17	3,54	2,17
Kalteng	0,57	0,94	1,54	2,15	2,65	3,25	3,64	2,27

Sumber :BPS, Susenans 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

Gambar 6.1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2008 dan 2009 fertilitas kumulatif untuk setiap kelompok umur yang dicerminkan oleh ALH di Propinsi Kalimantan Tengah rata-rata mengalami sedikit kenaikan di kelompok umur ibu usia muda, juga untuk kelompok umur lainnya semua mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak.

Gambar 6.1 : Rata-rata Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup menurut Kelompok Umur Ibu, Tahun 2008 dan 2009



Sumber : BPS, Susenas 2006 dan 2007 Propinsi Kalimantan Tengah

Perubahan fertilitas kumulatif menurut umur dari satu periode ke periode berikutnya dapat mencerminkan perubahan fertilitas menurut *kohort*. Kendati hal ini tidak terlalu tepat, karena perempuan yang diamati pada suatu tahun sensus belum tentu merupakan perempuan yang sama pada tahun sensus berikutnya.

6.2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Kematian Bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, nilai budaya dan adat istiadat, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia.

Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2005 angka kematian bayi menunjukkan sebesar 28 per 1000 kelahiran hidup. Artinya setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 28 bayi meninggal sebelum usia 1 tahun. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2000 dimana secara berturut-turut sebesar 37 per 1000 kelahiran.

Bila dirinci menurut jenis kelamin, kematian bayi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan. Gambar 6.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2000 dari setiap 1000 kelahiran bayi perempuan hidup maka 32 diantaranya meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Sedangkan dari setiap 1000 kelahiran bayi laki-laki hidup, 42 diantaranya meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Keadaan kematian bayi baik perempuan maupun laki-laki tidak banyak mengalami perubahan, pada tahun 2003 dari setiap 1000 kelahiran bayi perempuan hidup, 24 diantaranya meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dan dari 1000 kelahiran bayi laki-laki hidup, 32 diantaranya meninggal sebelum usia 1 tahun.

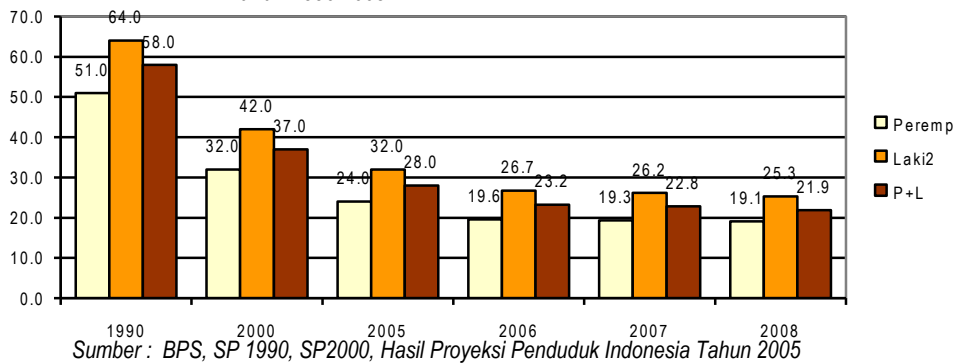
Bila dilihat selama periode 1990–2008, AKB Propinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan yang cukup menggembirakan yaitu dari 100 per 1000 kelahiran hidup (1980) menjadi masing-masing 58, 37, 28, 23, 22 dan 21 di tahun 1990, 2000, 2005, 2006, 2007, dan 2008 (Gambar 6.2). Melihat pola tersebut, ada kecenderungan pada tahun-tahun yang akan datang AKB akan mengalami penurunan terus dan sebaliknya angka harapan hidup waktu lahir akan meningkat.

Penurunan AKB yang tajam setelah tahun 1990 an utamanya berkaitan erat dengan banyak faktor-faktor program pembangunan kesehatan seperti, upaya pemerataan dan perluasan jangkauan, pelayanan kesehatan, upaya peningkatan cakupan imunisasi anak di bawah usia 14 bulan, pertolongan persalinan, serta pengembangan keluarga sejahtera lewat program keluarga berencana, dibarengi dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat yang semakin membaik mendorong turunnya angka kematian bayi.

Di samping itu, peningkatan peran serta masyarakat juga bertambah baik, antara lain, kesadaran penduduk terhadap kesehatan telah semakin meningkat, kesempatan untuk memperoleh pengobatan. Upaya di luar kesehatan masih belum memadai seperti: perbaikan lingkungan fisik dan biologis. Tingkat pendidikan ibu belum kondusif terhadap upaya kesehatan preventif. Perilaku dan kebiasaan masyarakat hidup sehat dan peran aktif dalam pembangunan kesehatan masih belum seperti yang diharapkan.

Kecenderungan angka kematian bayi perempuan dan laki-laki yang semakin menurun juga disebabkan oleh peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksa kesehatannya termasuk melakukan konsultasi ke dokter kandungan, bidan atau para medis lainnya. Disamping itu, penyebaran fasilitas kesehatan yang semakin merata mulai dari kota sampai ke pelosok pedesaan.

Gambar 6.2 : Angka Kematian Bayi (AKB) menurut Jenis Kelamin, Tahun 1990-2008



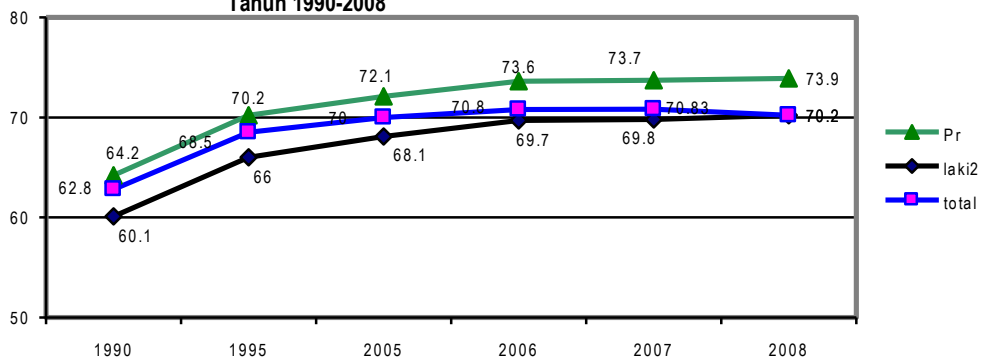
6.3. Angka Harapan Hidup

Salah satu cara untuk menilai tingkat kesehatan secara umum adalah dengan melihat angka harapan hidup waktu lahir. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Disamping itu angka harapan hidup ini sangat erat kaitannya dengan angka kematian bayi.

Angka harapan hidup waktu lahir merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Gambar 6.3 menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk tahun 1995 adalah 68,5 tahun, sedangkan pada tahun 2005 meningkat menjadi 70,0 tahun. Semakin tinggi usia harapan hidup semakin meningkat kualitas kesehatan masyarakat.

Dari Gambar 6.3 juga diperoleh gambaran bahwa rata-rata harapan hidup penduduk perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Pada tahun 2008 penduduk perempuan umumnya mempunyai rata-rata hidup sampai umur 74 tahun, sedangkan laki-laki sampai 70 tahun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2005, dimana tahun 2005 untuk perempuan mempunyai rata-rata hidup sampai 72 tahun dan laki-laki 68 tahun. Perbedaan angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan ini tercatat ± 4 tahun. Hal ini sebagai akibat resiko kematian saat mencari nafkah yang pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki sangat besar, seperti sebagai pekerja tambang emas, menebang kayu dan lain-lain.

Gambar 6.3 : Angka Harapan Hidup (e_0) menurut Jenis Kelamin, Tahun 1990-2008



Sumber : BPS, SP 1990, Supas 1995, Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2005

Disamping itu kenaikan harapan hidup ini menunjukkan bahwa tingkat kematian semakin rendah dan harapan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari semakin panjang. Pergeseran struktur umur dengan semakin tingginya harapan hidup ini akan menciptakan suatu potensi peningkatan penduduk lanjut usia (lansia). Dengan adanya pertumbuhan penduduk lansia ini berarti merupakan beban tanggungan bagi penduduk yang masih memproduksi.

6.3.1. Angka Penyebab Kesakitan Anak

Salah satu cara untuk melihat keberhasilan program kesehatan masyarakat adalah dari angka kesakitan. Angka ini menunjukkan jumlah penderita penyakit yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun pengumpulan data kesehatan penduduk ini menggunakan pendekatan subjektif, yaitu berdasarkan pengakuan responden.

Berdasarkan data Susenas 2009 pada Tabel 6.2 menunjukkan bahwa keluhan kesehatan utama yang dialami anak di daerah perkotaan maupun pedesaan tidak banyak bervariasi. Untuk daerah perkotaan, keluhan utama yang dirasakan adalah batuk (26,92 persen). Kemudian diikuti oleh keluhan karena panas, pilek, sakit kepala berulang, dan lainnya yang masing-masing sebesar 25,78 persen, 15,81 persen, 10,73 persen, dan 10,21 persen. Sedangkan di pedesaan keluhan utama karena panas menempati prioritas utama sebesar 32,88 persen dan diikuti oleh keluhan batuk (22,34 persen), pilek (13,48 persen), dan sakit kepala berulang (10,43 persen).

Tabel 6.2 Persentase Anak-anak menurut Wilayah Tempat Tinggal Dan Keluhan Utama Yang Dialami selama sebulan yang lalu, Tahun 2009

Daerah	Keluhan Kesehatan yang Utama								Jumlah
	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit kepala berulang	Sakit gigi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
Perkotaan	25,78	26,92	15,81	2,56	3,52	10,73	4,46	10,21	100,00
Pedesaan	32,88	22,34	13,48	2,90	6,08	10,43	2,29	9,61	100,00
Total	30,27	24,02	14,34	2,77	5,14	10,54	3,09	9,83	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

6.4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Meskipun Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami banyak kemajuan sebagai hasil dari pembangunan, namun ketimpangan di bidang kesehatan masih cukup memprihatinkan. Selama ini perbedaan derajat kesehatan masyarakat antara daerah perkotaan dan pedesaan maupun antara penduduk miskin dengan penduduk yang mampu masih sangat besar. Namun demikian peningkatan pelayanan kesehatan khususnya di kantong-kantong kemiskinan terus diusahakan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, seperti yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) dalam mengevaluasi sarana dan prasarana kesehatan di desa-desa yang dinilai banyak penduduk miskin. Oleh karena berbagai macam kendala mengakibatkan banyak masyarakat miskin kurang memanfaatkan segala sarana yang ada, baik melalui berbagai jenis puskesmas (puskesmas biasa, puskesmas pembantu dan puskesmas dengan tempat tidur) maupun pelayanan rumah sakit.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas Departemen Kesehatan telah meningkatkan kuantitas dengan membangun atau memperbaiki puskesmas-puskesmas di desa-desa, dan sarana kesehatan lainnya seperti apotik. Sejalan dengan penambahan jumlah puskesmas dan jumlah apotik, maka penyediaan paket obat-obatan secara otomatis juga meningkat. Keadaan ini merupakan gambaran semakin membaiknya sarana kesehatan yang tersedia. Ditambah lagi dengan adanya pemanfaatan obat generik, sehingga penyediaan obat bermutu sebagai bagian dari pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Demikian halnya dengan tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat, para medis non perawat, dan tenaga akademis bidang kesehatan terus diusahakan. Namun kenyataannya banyak daerah yang kekurangan tenaga para medis terutama di daerah terpencil dan transmigrasi, sehingga banyak puskesmas pembantu yang hanya dikelola oleh seorang tenaga medis saja. Hal ini disebabkan karena penyebaran dokter tidak merata (umumnya berada di daerah perkotaan). Padahal idealnya di setiap puskesmas harus ada minimal satu dokter.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 6.3, dimana jumlah puskesmas tahun 2000 sebanyak 133 buah meningkat menjadi 174 buah pada tahun 2009, puskesmas pembantu pun mengalami peningkatan dari 708 buah pada tahun 2000 menjadi 1.012 buah pada tahun 2009.

Secara keseluruhan pembangunan sarana kesehatan di Propinsi Kalimantan Tengah telah berhasil menurunkan rasio penduduk terhadap perawat/bidan, dokter dan puskesmas pembantu.

Tabel 6.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kalimantan Tengah Tahun (2000 – 2009)

Tahun	Jenis Fasilitas Kesehatan		
	Rumah Sakit *)	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	11	133	708
2005	14	142	826
2006	14	149	816
2007	14	157	861
2008	14	163	872
2009	18	174	1.012

Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah

6.5. Fasilitas Kesehatan dan Cara Berobat

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat salah satunya adalah mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan bila mempunyai keluhan kesehatan. Pada tahun 2009 rata-rata jumlah kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam periode satu bulan penduduk Kalimantan Tengah hanya sebesar 0,074, angka ini merupakan rata-rata kunjungan dengan faktor pembagi total penduduk baik yang sakit maupun yang tidak.

Jumlah fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta di Propinsi Kalimantan Tengah sangat terbatas bila dibandingkan dengan luas Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Penyebaran penduduk mulai dari perkotaan sampai dengan penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah transmigrasi bahkan jauh di daerah pegunungan.

Ketidakmerataan penempatan fasilitas kesehatan mengakibatkan ada perbedaan pemanfaatan fasilitas kesehatan di perkotaan dengan di pedesaan. Rumah sakit Pemerintah yang umumnya terdapat di ibukota propinsi dan kabupaten tidak ada perbedaan yang berarti antara dikunjungi oleh perempuan dibanding laki-laki baik itu di perkotaan dan pedesaan. Untuk perkotaan untuk laki-laki (12,41 persen) dan perempuan (9,76 persen), sedangkan di daerah pedesaan adalah laki-laki 6,78 persen berbanding 7,93 persen untuk perempuan. Sarana kesehatan yang

sering dikunjungi perempuan adalah praktek dokter (39,06 persen), praktek puskesmas/pustu (35,06 persen) dan tenaga kesehatan (13,09 persen) untuk daerah perkotaan.

Tabel 6.4 : Persentase Kunjungan Penduduk ke Pelayanan Kesehatan, menurut Tempat Pelayanan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2009

No	Tempat Pelayanan/ Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	RS Pemerintah	12,41	9,76	11,11	6,78	7,93	7,32
2.	RS Swasta	1,01	1,02	1,01	0,36	0,25	0,31
3.	Praktek dokter	39,98	39,06	39,53	7,01	6,31	6,68
4.	Puskesmas/Pustu	34,16	35,06	34,60	62,39	62,94	62,65
5.	Praktek Tng Kes	11,12	13,09	12,08	21,36	19,62	20,54
6.	Pengobatan Tradisional	0,14	0,49	0,31	0,47	1,54	0,98
7.	Dukun Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,13
8.	Lainnya	1,18	1,53	1,35	1,63	1,14	1,39
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

Fasilitas kesehatan di perdesaan yang dimanfaatkan perempuan lebih banyak Puskesmas/pustu (62,94 persen) dan Praktek Tenaga Kesehatan (19,62 persen), sedangkan laki-laki selain Puskesmas/pustu (62,39 persen) dan Praktek Tenaga Kesehatan (21,36 persen) yang dominan, juga memanfaatkan Praktek Dokter (7,01 persen). Ketiga tempat ini dapat melayani penyakit ringan atau sekedar tempat meminta surat rujukan jika penyakit pasien tidak bisa dilayani.

Kondisi jarak antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan fasilitas kesehatan cukup jauh, dimana umumnya lokasi Puskesmas dan Pembantu Puskesmas berada di ibukota kecamatan, sedangkan pemukiman penduduk cukup jauh tersebar diluar ibukota kecamatan, membuat penduduk berobat ke Puskesmas atau ke Puskesmas Pembantu kadang-kadang dianggap sangat merugikan baik dari segi waktu maupun dari segi biaya.

Bila dilihat rata-rata per kabupaten/kota pada Tabel 6.5, maka rata-rata Kabupaten Sukamara pada tahun 2009 paling tinggi yaitu 0,432 kemudian diikuti Kabupaten Kotawaringin Tarat 0,431, Kabupaten Kotawaringin Barat 0,294 dan Kota Palangka Raya 0,254.

Untuk bisa melihat lebih spesifik, angka kunjungan bisa dibatasi bagi mereka yang mengeluh mendapat gangguan kesehatan saja. Angka ini menggambarkan penggunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan oleh mereka yang memang sakit. Penggunaan fasilitas kesehatan di perkotaan masih lebih baik dibandingkan di perdesaan, hal ini kemungkinan disebabkan oleh kepercayaan masyarakat perdesaan untuk berobat pada pengobatan tradisional.

Tabel 6.5 : Angka Kunjungan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Angka Kunjungan per Semua Penduduk	Angka Kunjungan per Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
(1)	(2)	(3)
1. Kotawaringin Barat	0,091	0,294
2. Kotawaringin Timur	0,105	0,431
3. K a p u a s	0,046	0,210
4. Barito Selatan	0,071	0,208

5. Barito Utara	0,086	0,253
6. Sukamara	0,117	0,432
7. Lamandau	0,072	0,223
8. Seruyan	0,056	0,213
9. Katingan	0,085	0,231
10. Pulang Pisau	0,075	0,231
11. Gunung Mas	0,072	0,249
12. Barito Timur	0,045	0,133
13. Murung Raya	0,012	0,127
6. Palangka Raya	0,080	0,254
Kalimantan Tengah	0,074	0,262

Sumber : BPS, Susenas 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

6.5.1. Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Medis

Jenis tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong. Dalam hal ini persalinan yang ditolong oleh tenaga medis, seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya dianggap lebih baik dibandingkan tenaga non medis seperti dukun, famili atau lainnya, karena mereka telah mendapat bekal pendidikan dan pengetahuan formal mengenai cara pertolongan persalinan yang benar dan sehat. Walaupun demikian, persalinan di daerah perdesaan Kalimantan Tengah masih banyak dibantu oleh dukun, famili dan lainnya (pada tahun 2009 sebesar 55,84). Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasa terdapat di daerah perdesaan.

Tabel 6.6 : Persentase Penolong Persalinan Balita Tahun 2009

Penolong Persalinan	Daerah		Total
	Kota	Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Medis	76,25	44,16	55,96
Bukan Tenaga Medis	23,75	55,84	44,04

Sumber : BPS, Susenas 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

Dalam 3 tahun terakhir penolong persalinan oleh tenaga medis mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan (Tabel 6.6). Namun tenaga medis masih mempunyai peranan penting dalam hal penolong persalinan, hal ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan tenaganya, pada tahun 2006 sebesar 51,99 persen. Angka ini menunjukkan bahwa di masyarakat di Propinsi Kalimantan Tengah ini menganggap kelahiran dengan ditolong oleh tenaga medis lebih aman daripada dengan tenaga non medis. Upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah persalinan dibantu tenaga bukan medis ditempuh dengan memperbanyak jumlah bidan melalui penempatan bidan di desa. (Program Bidan Desa). Di Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2000 terdapat penambahan jumlah bidan sebanyak 199 bidan dan pada tahun 2001 sebanyak 256 bidan (Profil Kesehatan Kalimantan Tengah, 2001).

6.5.2. Persentase Penduduk Sakit dengan Pengobatan Sendiri

Cara penyembuhan yang umum dilakukan adalah mengobati sendiri keluhan yang dirasakan. Di Kalimantan Tengah pada tahun 2009 cara ini masih cukup tinggi yaitu sebesar 77,86 persen (Tabel 6.7), yang berarti bahwa 3 per empat penduduk Kalimantan Tengah masih mengobati sendiri keluhan yang dirasakannya. Hal ini juga menggambarkan disamping masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk untuk memanfaatkan sarana kesehatan, juga disebabkan faktor biaya dan jarak yang tidak terjangkau dan faktor lainnya.

Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dapat dikatakan yang paling rendah dalam memanfaatkan sarana kesehatan, sebab pada tahun 2009 persentase penduduk sakit yang tidak menggunakan sarana kesehatan sebesar 87,47 persen, paling tinggi diantara kabupaten lainnya, ini mungkin disebabkan masih belum lengkapnya fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

Tabel 6.7 **Persentase Penduduk Sakit Dengan Pengobatan Sendiri Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009**

Kabupaten/Kota (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan	Jumlah
1. Kotawaringin Barat	77,87	85,64	81,48
2. Kotawaringin Timur	62,39	71,18	68,81
3. K a p u a s	95,12	74,14	76,36
4. Barito Selatan	80,55	79,56	79,91
5. Barito Utara	91,07	84,07	86,42
6. Sukamara	63,01	82,36	77,89
7. Lamandau	58,20	67,15	66,03
8. Seruyan	82,08	86,71	85,95
9. Katingan	85,57	81,32	82,45
10. Pulang Pisau	95,14	86,47	87,47
11. Gunung Mas	79,49	80,34	80,12
12. Barito Timur	73,09	68,24	69,60
13. Murung Raya	100,00	69,46	71,55
6. Palangka Raya	76,08	59,97	73,85
Kalimantan Tengah	78,05	77,77	77,86

Sumber : BPS, Susenas 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

6.6. Status Kesehatan dan Gizi

6.6.1. **Persentase Penduduk Sakit yang Menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit/Klinik yang Menyediakan Tenaga Medis**

Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan sarana kesehatan untuk rawat inap. Pada tahun 2009 di Kalimantan Tengah terdapat 14,35 persen penduduk sakit yang mengalami rawat inap. Persentase terbesar terdapat di daerah perkotaan yaitu 20,39 persen dibanding daerah perdesaan yang hanya 10,98 persen . Hal ini disebabkan sarana dan fasilitas untuk rawat inap di perkotaan lebih baik. Dapat juga disebabkan oleh tingkat kemampuan masyarakat perkotaan dalam melakukan pengobatan penyakit yang dialami lebih tinggi dibanding masyarakat perdesaan.

6.6.2. **Rata-rata Lama Sakit/Keluhan (RLS)**

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberi pengaruh pada tingkat produktivitas.

Tabel 6.8 : Rata-Rata lama Sakit Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Lama Sakit (hari)	
	Laki - laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
1. Kotawaringin Barat	5	5
2. Kotawaringin Timur	5	5
3. K a p u a s	5	4
4. Barito Selatan	5	5
5. Barito Utara	4	4
6. Sukamara	6	5
7. Lamandau	5	5
8. Seruyan	4	4
9. Katingan	5	4
10. Pulang Pisau	4	4
11. Gunung Mas	5	4
12. Barito Timur	5	4
13. Murung Raya	3	3
71. Palangka Raya	4	4
Kalimantan Tengah	5	4

Sumber : BPS, Susenas 2009 Propinsi Kalimantan Tengah

Rata-rata lama sakit dari penduduk yang pernah sakit juga memberikan gambaran keadaan status kesehatan penduduk. Pada tahun 2009 rata-rata lama sakit penduduk Kalimantan Tengah untuk penduduk laki-laki adalah 5 hari, sedangkan untuk penduduk perempuan adalah 4 hari. Sedangkan rata-rata lama sakit penduduk Kabupaten Murung Raya paling kecil diantara kabupaten/kota lainnya. Sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Sukamara sebanyak 6 hari untuk laki-laki dan 5 hari untuk perempuan.

6.7.3. Gizi

Secara umum gizi atau zat gizi adalah zat makanan yang diperlukan tubuh manusia dalam jumlah tertentu untuk hidup sehat. Bila semua zat gizi yang diperlukan dapat dipenuhi, maka seseorang akan mempunyai peluang hidup sehat yang tinggi. Untuk itu gizi merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia karena sangat berpengaruh terhadap kematian, masa pertumbuhan dan daya tahan tubuh, kecerdasan serta produktivitas kerja. Kekurangan gizi disamping mengakibatkan kelesuan, tidak bersemangat, juga mudah terserang penyakit, pertumbuhan terlambat, tingkat kecerdasan yang rendah dan umur harapan hidup relatif pendek. Menurut standar gizi LIPI kebutuhan minimal kalori perkapita sehari adalah 2100 gram dan protein 45 gram.

Menyadari pentingnya penanggulangan masalah gizi terutama pada anak balita dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup dalam upaya perbaikan gizi penduduk dengan berbagai cara antara lain melalui proyek Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan upaya lain yang berhubungan dengan peningkatan produksi pangan dan pendapatan masyarakat. Pada dasarnya upaya tersebut dilakukan secara terintegrasi antar sektor dan lebih terpusat kepada inisiatif masyarakat sendiri. Tujuan utama UPGK adalah agar masyarakat sadar akan gizi dan selanjutnya hidup sehat serta produktif.

Tabel 6.9

Konsumsi Kalori, Protein dan Lemak Perkapita Sehari Menurut Asal Bahan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 1993 – 2003

Tahun	Nabati		Hewani		Jumlah	
	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
1993						
Kalori	1.900,88	93,30	136,32	6,70	2.037,20	100,00
Protein (gr)	35,79	66,40	17,10	33,60	50,89	100,00
Lemak (gr)	50,91	88,71	6,43	11,29	57,34	100,00
1995*)						
Kalori	2.219,00	93,83	146,00	6,17	2.365,00	100,00
Protein (gr)	38,38	66,00	19,77	44,00	58,18	100,00
Lemak (gr)	44,06	86,63	6,80	13,37	50,86	100,00
1999						
Kalori	1.937,47	93,08	143,96	6,92	2.081,43	100,00
Protein (gr)	40,92	71,25	16,51	28,75	57,43	100,00
Lemak (gr)	51,93	88,85	6,52	11,15	58,45	100,00
2000*)						
Kalori	2.033,11	92,73	159,45	7,27	2.192,56	100,00
Protein (gr)	38,21	64,29	21,22	35,71	59,43	100,00
Lemak (gr)	45,08	86,43	7,08	13,57	52,13	100,00
2003*)						
Kalori	2.011,90	92,42	164,87	7,58	2.176,77	100,00
Protein (gr)	55,59	70,99	22,72	29,01	78,31	100,00
Lemak (gr)	51,29	86,24	8,18	13,76	59,47	100,00

Keterangan : *) Angka perkiraan

Sumber : BPS, Susenas 1990 - 2003 Propinsi Kalimantan Tengah

Dari tahun 1990 - 2003 telah terjadi perubahan, pola konsumsi kalori, protein dan lemak (lihat Tabel 6.9), dimana adanya penurunan pada konsumsi kalori yaitu 2.457,90 kalori pada tahun 1990 menjadi 2.176,77 kalori pada tahun 2002. Sedangkan untuk konsumsi protein dan lemak terjadi peningkatan yaitu masing-masing 53,36 gram menjadi 59,43 gram (1990-2000) dan 56,74 gram menjadi 52,13 gram. Secara keseluruhan gizi masyarakat Kalimantan Tengah masih berada diatas standar minimum kalori perkapita per hari.

Banyaknya konsumsi perkapita sehari yang meliputi kalori, protein dan lemak oleh masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1990 telah terpenuhi bahkan melebihi syarat minimal yang digariskan oleh LIPI. Sebagaimana yang disajikan pada tabel 6.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2002 jumlah kalori perkapita yang dikonsumsi perhari adalah sebesar 2.176,77 yang terdiri dari Nabati 2.011,90 atau 92,42 persen dan hewani 164,87 atau 7,58 persen. Selanjutnya protein 78,31 gram yang terdiri dari nabati 55,59 gram atau 70,99 persen dan hewani 22,72 gram atau 29,01 persen. Lemak 59,47 gram yang terdiri dari Nabati 51,29 gram atau 86,24 persen dan hewani 8,18 gram atau 13,76 persen.

BAB VII

KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan pendapatan/ penghasilannya, namun penghitungan pendapatan suatu masyarakat melalui kegiatan survei sulit dilaksanakan terutama karena adanya hambatan masalah teknis pada saat wawancara. Untuk itu penghasilan rumah tangga diperkirakan dari data pengeluaran rumah tangga.

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (demand) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumahtangga. Sebaliknya di negara-negara maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran tersebut tidak bersifat primer lagi, antara lain pengeluaran untuk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, peningkatan pendidikan, rekreasi, olah raga dan sebagainya.

7.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita

Secara keseluruhan angka-angka tersebut menunjukkan kecenderungan turunnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan. Ini merupakan indikator meningkatnya penggunaan pendapatan untuk non pangan selama kurun waktu tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini dapat diartikan sebagai membaiknya kesejahteraan rumah tangga.

Pada Tabel 7.1 disajikan data pengeluaran rata-rata per kapita untuk kelompok makanan dan bukan makanan per kabupaten/kota dan provinsi keadaan tahun 2005-2009. Selama kurun waktu 2005-2009 total pengeluaran rata – rata mengalami kenaikan, hal ini bisa disebabkan disebabkan oleh dua hal yaitu masyarakat yang makin konsumtif dan tingginya harga komoditi sehingga pengeluaran dengan sendirinya bertambah.

Tabel 7.1 : Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Tahun 2005-2009 (rupiah)

Konsumsi/Pengeluaran	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bahan Makanan	156.442	184.960	207.185	285.846	280.883
Non Makanan	81.872	100.479	107.003	198.772	163.198
Total Pengeluaran	238.314	285.438	314.188	484.618	444.081

Sumber : BPS, Susenas 2005-2009 Provinsi Kalimantan Tengah

Seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 7.1 pengeluaran rata-rata perkapita setiap bulan untuk bahan makanan pada tahun 2009 sebesar 63,25 persen dari total pengeluaran, sedangkan pengeluaran non makanan hanya 36,75 persen. Artinya bahwa semua pengeluaran di Provinsi Kalteng ini masih terkonsentrasi pada konsumsi makanan, hal ini sama persis dengan kondisi pada daerah-daerah yang sedang berkembang. Pengeluaran perkapita sebulan untuk masyarakat perkotaan terlihat jauh lebih besar dari masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan perekonomian masyarakat di daerah perkotaan lebih maju dari pedesaan, disamping pola konsumsi masyarakat kota yang sarat jenis dan kualitas komoditasnya.

Sejalan dengan peningkatan pengeluaran perkapita sebulan, maka selain peningkatan pengeluaran perkapita untuk bahan makanan, pengeluaran perkapita untuk bahan bukan makanan pun meningkat, seperti perumahan, bahan bakar dan air, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak, keperluan pesta dan upacara.

Tabel 7.2 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Untuk Bahan Makanan Tahun 2005 - 2009 (rupiah)

Bahan Makanan	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padi-padian	29.547	44.187	48.931	50.882	55.634
2. Umbi-umbian	1.926	1.849	1.986	2.403	2.651
3. I k a n	25.565	29.509	32.430	39.956	43.423
4. Daging	8.838	8.976	8.431	14.152	14.733
5. Telur & Susu	10.312	11.440	12.375	17.264	19.338
6. Sayur-sayuran	10.820	12.168	14.623	25.540	19.938
7. Kacang-kacangan	3.757	4.159	4.913	5.959	7.428
8. Buah-buahan	4.521	5.054	4.748	10.649	12.444
9. Konsumsi Lainnya	27.330	31.834	36.427	9.309	10.695
10. Makanan sudah jadi	13.478	13.003	15.883	40.694	24.733
11. Minuman yang mengandung alkohol	173	212	235	677	592
12. Tembakau dan sirih	20.174	22.569	26.204	31.968	35.503
13. Minyak dan lemak	-	-	-	12.470	10.814
14. Bahan minuman	-	-	-	14.318	14.723
15. Bumbu-bumbuan	-	-	-	9.604	8.235
J u m l a h	156.442	184.960	207.185	285.846	280.883

Sumber : BPS, Susenas, 2005-2009 Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 7.3 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Untuk Bahan Non Makanan Tahun 2005-2009 (rupiah)

Bahan Non Makanan	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perumahan, Bahan Bakar Penerangan dan Air	43.538	54.703	56.814	98.943	86.972
2. Aneka Barang dan Jasa	19.973	25.977	29.166	44.247	28.119
3. Biaya Pendidikan	-	-	-	6.451	10.866
4. Biaya Kesehatan	-	-	-	7.782	6.720
5. Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	5.920	7.212	7.755	15.906	9.979
6. Barang Tahan Lama	7.437	8.231	8.224	22.217	11.397
7. Pajak Pemakaian dan Asuransi	1.673	1.876	2.129	3.228	5.229
8. Keperluan Pesta dan Upacara	3.331	2.480	2.916	-	3.916
J u m l a h	81.872	100.479	107.003	198.773	163.198

Sumber : BPS, Susenas 2005-2009 Provinsi Kalimantan Tengah

BAB VIII KETENAGAKERJAAN

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Dengan demikian titik sentral ketenagakerjaan adalah perencanaan tenaga kerja yang mencakup pertama, penyusunan program penyediaan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan; Kedua penyusunan program penciptaan kesempatan kerja supaya dapat menggunakan sumber daya manusia secara optimal; Ketiga terciptanya lapangan kerja baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Oleh karena upaya pembangunan banyak diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan, misalnya skala prioritas arah pertumbuhan antara sektor informal dan formal di perkotaan. Akhir-akhir ini di sektor informal di perkotaan semakin berperan penting dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja, maka menjadi kurang bijaksana jika kebijakan pembangunan perkotaan lebih diarahkan pada sektor formal.

Program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu diusahakan demi terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan perluasan dan pemerataan lapangan kerja serta peningkatan mutu lapangan pekerjaan diharapkan akan dapat dikurangi perbedaan penghasilan diantara tenaga kerja yang berpenghasilan tinggi dan rendah, sehingga dengan demikian dapat ditingkatkan pemerataan pendapatan.

8.1. Penduduk Usia Kerja

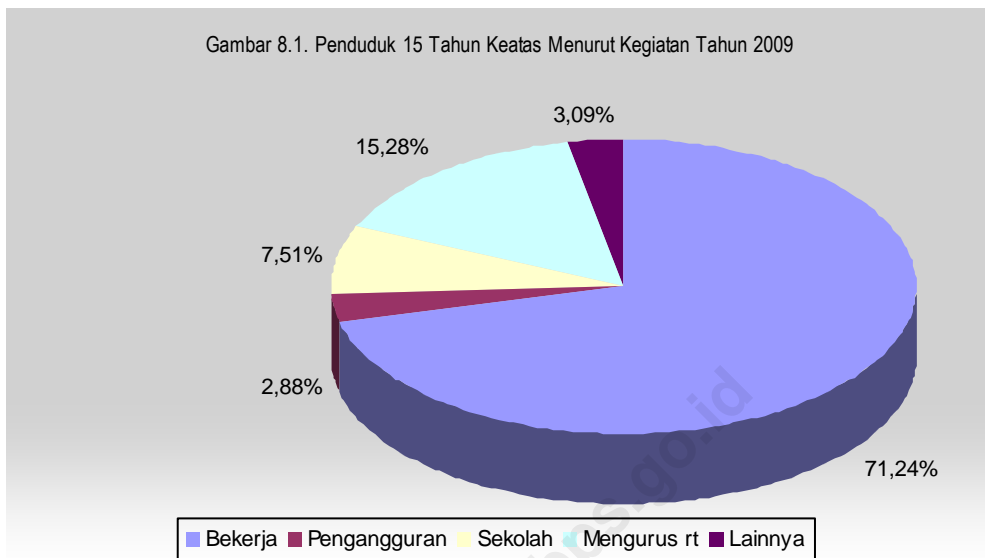
Pada tahun 2009 penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) tercatat sebanyak 1,48 juta orang atau 68,02 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut 52,35 persen adalah penduduk laki-laki dan 47,65 persen penduduk perempuan atau penduduk usia kerja laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 8.1. Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin Februari 2010

Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja (AK)	688.675	412.337	1.101.012
- Bekerja	664.902	393.379	1.058.281
- Pengangguran	23.773	18.958	42.731
Bukan AK (BAK)	89.020	295.317	384.337
- Sekolah	56.690	54.812	111.502
- Mengurus Rmt.	6.355	220.652	227.007
- Lainnya	25.975	19.853	45.828
Jumlah	777.695	707.654	1.485.349

Sumber : BPS, Sakernas Februari 2010 Propinsi Kalimantan Tengah

Dari penduduk usia kerja di Kalimantan Tengah 74,12 persen adalah angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran, sedangkan 25,88 persen diantaranya bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya.



Sumber : BPS, Sakernas Februari 2010

Apabila diuraikan lebih lanjut, sebagian besar penduduk yang termasuk angkatan kerja melakukan kegiatannya dengan bekerja (96,11 %) sedangkan sisanya (3,89 %) pengangguran. Sementara itu untuk penduduk bukan angkatan kerja melakukan kegiatannya dengan sekolah (29,01 %), mengurus rumahtangga (59,06 %) dan lainnya (11,92 %).

Penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki bukan angkatan kerja. Sebaliknya untuk penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja lebih kecil dibandingkan dengan penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja. Masih kentalnya tatanan sosial budaya masyarakat, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah, sehingga, angkatan kerja laki-laki (52,35 %) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan (47,65 %).

8.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi ini biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah penduduk Angkatan Kerja dengan penduduk usia kerja.

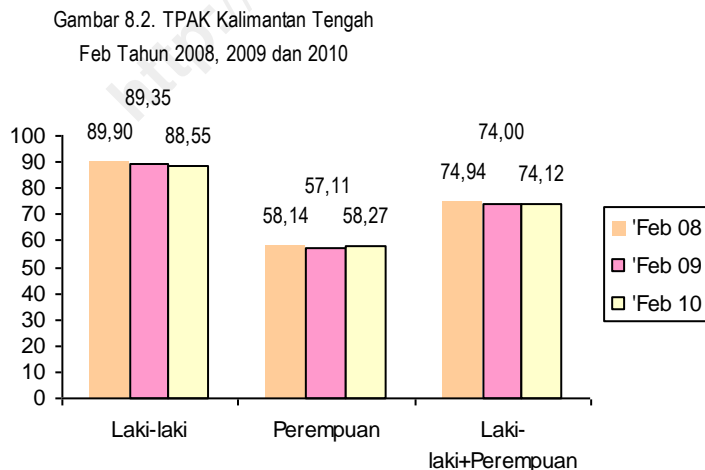
Berdasarkan Sakernas Feb 2010, TPAK total Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 74,12 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 74 orang diantaranya termasuk angkatan kerja aktif secara ekonomis.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, ternyata TPAK laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan, dimana TPAK laki-laki tercatat sebesar 88,55 persen sedangkan TPAK perempuan 58,27 persen. Hal ini berarti penduduk laki-laki yang aktif secara ekonomis lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel. 8.2 Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja, dan Pengangguran Terbuka, Feb 2008, Feb 2009, dan Feb 2010

Uraian	Feb 2008	Feb 2009	Feb 2010
(1)	(2)	(3)	(4)
TPAK			
- Total	74,94	74,00	74,12
- Laki-laki	89,90	89,35	88,55
- Perempuan	58,14	57,11	58,27
Tingkat Kesempatan Kerja			
- Total	95,21	95,47	96,12
- Laki-laki	95,75	95,47	96,55
- Perempuan	94,28	95,46	95,40
Tingkat Pengangguran Terbuka			
- Total	4,79	4,53	3,88
- Laki-laki	4,25	4,53	3,45
- Perempuan	5,72	4,54	4,60

Sumber : BPS, Sakernas Februari 2008, 2009 dan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : BPS, Sakernas Feb. 2008, 2009, dan 2010 Propinsi Kalimantan Tengah

Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sedangkan angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan menganggur. Pada Februari 2010 tingkat kesempatan kerja di

Kalimantan Tengah sebesar 96,12 persen. Ini berarti sekitar 96 dari 100 penduduk angkatan kerja sudah bekerja, sedangkan 4 dari 100 penduduk lainnya masih menganggur (pengangguran terbuka). Penduduk yang tergolong pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, dan hanya mencari pekerjaan /mempersiapkan usaha.

Sementara itu pada Februari 2010, dari 100 angkatan kerja laki-laki, 3 orang diantaranya menganggur, dan dari 100 angkatan kerja perempuan, 4 orang diantaranya menganggur, yang menunjukkan penduduk perempuan yang mencari kerja (menganggur) lebih besar dari pada penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesempatan kerja laki-laki (96,55 %) lebih besar dibanding tingkat kesempatan kerja perempuan (95,40 %).

Pada Februari 2010 angka pengangguran terbuka mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan Februari 2009, dimana angka pengangguran terbuka Februari 2009 sebesar 4,53 persen turun menjadi 3,88 persen pada Februari 2010.

8.3. Lapangan Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Disamping itu indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah/daerah.

Tabel 8.4. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Feb 2009 dan Feb 2010

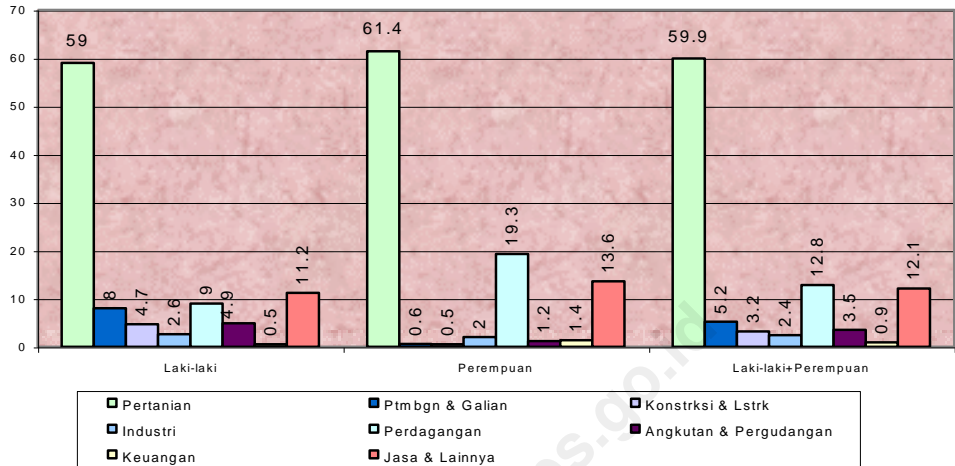
Lapangan Usaha	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Feb 2009	Feb 2010	Feb 2009	Feb 2010	Feb 2009	Feb 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	60,7	59,0	64,6	61,4	62,1	59,9
Pertambangan & Penggalian	7,8	8,0	0,6	0,6	5,1	5,2
Konstruksi, Air & Listrik	5,3	4,7	0,1	0,5	3,3	3,1
Industri	2,0	2,6	3,8	2,0	2,6	2,4
Perdagangan	9,3	9,0	22,0	19,3	14,0	12,8
Perhubungan dan Pergudangan	4,9	4,9	0,6	1,2	3,3	3,5
Keuangan & Jasa Perusahaan	0,8	0,5	0,6	1,4	0,8	0,9
Jasa-jasa dan Lainnya	9,3	11,2	7,7	13,6	8,7	12,1

Sumber : BPS, Sakernas Feb 2009 dan Sakernas Feb 2010 Propinsi Kalimantan Tengah

Dari Tabel 8.4 di atas terlihat bahwa sektor Pertanian masih mendominasi dalam menyerap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan dimana hampir mencapai 60 persen pekerja, bekerja disektor ini. Selanjutnya sektor perdagangan (12,8%) menjadi pilihan kedua dan diikuti oleh sektor jasa-jasa dan lainnya (12,1%).

Kemampuan sektor keuangan dalam menyerap tenaga kerja yang masih sangat kecil (0,9%), menandakan bahwa sektor ini belum dapat diandalkan dalam perekonomian di Propinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 8.3 : Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun Februari 2010



8.4. Status dan Jenis Pekerjaan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status dan jenis pekerjaan. Tabel 8.5 menunjukkan bahwa masih banyak pekerja di Kalimantan Tengah yang bekerja disektor informal. Hal ini terlihat dari tingginya persentase (22,81 %) pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu dengan buruh tidak tetap.

Tabel 8.5. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Feb 2009 & Feb 2010

Status Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	Feb 2009	Feb 2010	Feb 2009	Feb 2010	Feb 2009	Feb 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	14,4	16,3	14,1	14,1	14,3	15,5
Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap	33,5	32,0	11,0	11,0	25,3	24,2
Berusaha dibantu dgn buruh tetap	4,2	2,5	0,8	1,1	2,9	2,0
Pekerja/buruh dibayar	27,4	31,6	18,0	24,2	24,0	28,9
Pekerja bebas pertanian	2,6	2,7	2,1	1,4	2,5	2,3
Pekerja bebas non pertanian	6,2	3,2	1,5	0,4	4,4	2,2
Pekerja keluarga	11,7	11,6	52,5	47,6	26,7	25,0

Sumber : BPS, Sakemas Feb 2009 dan Sakemas Feb 2010 Propinsi Kalimantan Tengah

Pada umumnya mereka yang berusaha sendiri ini ada disektor pertanian. Pola struktur pekerjaan antara laki-laki dan perempuan Februari 2010 berbeda. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (47,6 %). Sedangkan untuk laki-laki pada umumnya berusaha dengan bantuan orang lain/buruh tidak tetap (32,0 %), buruh / karyawan dibayar (31,6 %) dan sebagai berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain (16,3 %).

8.5. Jam Kerja.

Orang dikatakan sebagai pekerja penuh (*full employed*) bila jam kerjanya telah mencapai 35 jam kerja atau lebih dalam seminggu (dengan mengikuti konsep bekerja minimal 1 jam per hari berturut-turut). Tabel 8.6 menunjukkan bahwa sebesar 70,14 persen penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2010 adalah pekerja penuh dan 29,87 persen pekerja tidak penuh. Menurut jenis kelamin, 77,63 persen penduduk laki-laki adalah pekerja penuh dan 22,36 persen pekerja tidak penuh, sedangkan perempuan yang termasuk pekerja penuh sebesar 57,46 persen dan 42,54 persen pekerja tidak penuh.

Tabel 8.6. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Tahun 2010

Jam Kerja	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 14	1,61	4,37	2,64
15 - 34	20,75	38,17	27,23
35+	77,63	57,46	70,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2010 Propinsi Kalimantan Tengah

BAB IX KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Terciptanya rasa ketenangan dan ketentraman sebagai bagian terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat akan dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, oleh karena itu masalah keamanan dan ketertiban masyarakat patut mendapat perhatian tersendiri. Peranan kamtibmas mengupayakan situasi dan kondisi masyarakat yang baik mutlak harus diciptakan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan ketertiban masyarakat dalam hubungannya dengan ketahanan nasional. Masyarakat tidak mungkin dikatakan sejahtera apabila di dalam kehidupannya sehari-hari selalu dibayangi oleh rasa ketakutan, keresahan, dan kecemasan yang akan menimbulkan ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatannya.

Pada umumnya kamtibmas merupakan keperluan hakiki seluruh masyarakat, maka oleh sebab itu masyarakat merupakan pendukung, pengemban, dan pelaksana dari fungsi kamtibmas yang dimaksud. Sementara itu peranan hukum juga merupakan kunci dari suksesnya pembangunan dan rasa tertib serta aman sejahtera di masyarakat itu sendiri. Laporan data jumlah narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan se Kalimantan Tengah pada umumnya setiap tahun terjadi penurunan yang berfluktuasi, seperti terlihat pada tabel 9.1 bahwa pada tahun 2008 terdapat narapidana 1.879 orang, kemudian menurun menjadi 1.724 orang pada tahun 2009.

Tabel 9.1 Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009

Tahun	Jenis Kelamin			Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	
2008	1.793	86		1.879
2009	1.674	50		1.724

Sumber: Kanwil Kehakiman dan HAM Kalimantan Tengah

Pada Tabel 9.2 terlihat jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2009 menurun yaitu 108 perkara dibanding tahun 2008 yaitu 155 perkara, hal ini menunjukkan masih banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di Kalimantan Tengah.

Tabel 9.2 Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Diterima dan Diselesaikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2009

Perkara	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sisa Tahun Lalu	22	18	18	9	12
2. Masuk Tahun Ini	133	114	106	155	108
3. Jumlah Tahun Ini	155	152	124	164	120
4. Diselesaikan	135	112	108	152	113
5. Sisa Tahun Ini	20	40	12	12	7

Sumber : Pengadilan Tinggi Propinsi Kalimantan Tengah

BAB X

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok disamping kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Rumah yang baik tentunya adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan lokasi perumahan idealnya dekat dengan fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar, dan tempat rekreasi. Oleh karena itu keadaan perumahan dan lingkungannya dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan rumah tangga khususnya dan keadaan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan masalah perumahan, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat melalui program perumahan murah (perumnas), program Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPRBTN) serta program perbaikan kampung yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Disamping itu program penyehatan lingkungan yang bertujuan menjaga, membentuk/menciptakan, dan melestarikan keadaan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman juga dilaksanakan. Karena disadari bahwa perumahan sekarang tidak hanya sekedar tempat untuk berteduh tetapi juga merupakan cermin bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu amat diperlukan terwujudnya suatu rumah sehat yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi penghuninya. Terbatasnya tanah untuk pemukiman penduduk khususnya di daerah perkotaan serta masih rendahnya tingkat perekonomian terutama di daerah-daerah pedesaan, memberi gambaran tentang kualitas perumahan pada umumnya yang erat kaitannya dengan derajat kesehatan keluarga.

Rumah yang baik serta lingkungan yang sehat diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya. Di daerah perkotaan pada umumnya perumahan penduduk relatif lebih baik bila dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Pembangunan perumahan di daerah perkotaan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang disamping untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal/usaha juga dipandang dari segi keindahan dan kelayakannya. Disamping itu pemerintah maupun badan-badan swasta yang bergerak dalam usaha penyediaan perumahan juga menyediakan rumah bagi penduduk dengan harga yang relatif murah.

Untuk melihat bagaimana kondisi suatu rumah, luas lantai dapat merupakan sebagai salah satu faktor penentu, mengingat rumah tangga dengan luas lantai yang cukup memadai dapat memberikan kenyamanan serta udara segar bagi pemilikinya. Fasilitas-fasilitas lain yang juga tidak kurang pentingnya untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi perumahan adalah jenis bahan bangunan yang dipergunakan bagi perumahan itu, bahan bakar yang digunakan untuk memasak, fasilitas penerangan lampu dan lain sebagainya. Disamping itu harus dilihat pula fasilitas-fasilitas lain yang sangat erat kaitannya dengan sarana-sarana kesehatan seperti sumber air minum, sumber air untuk mandi dan mencuci pakaian, jamban serta kakus maupun pemilikan barang rumah tangga seperti pesawat tv, sepeda motor dan barang-barang bernilai tinggi lainnya yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan penduduk/rumah tangga.

10.1. Berbagai Unsur Rumah/Tempat Tinggal

10.1.1. Status Penguasaan Rumah Tinggal

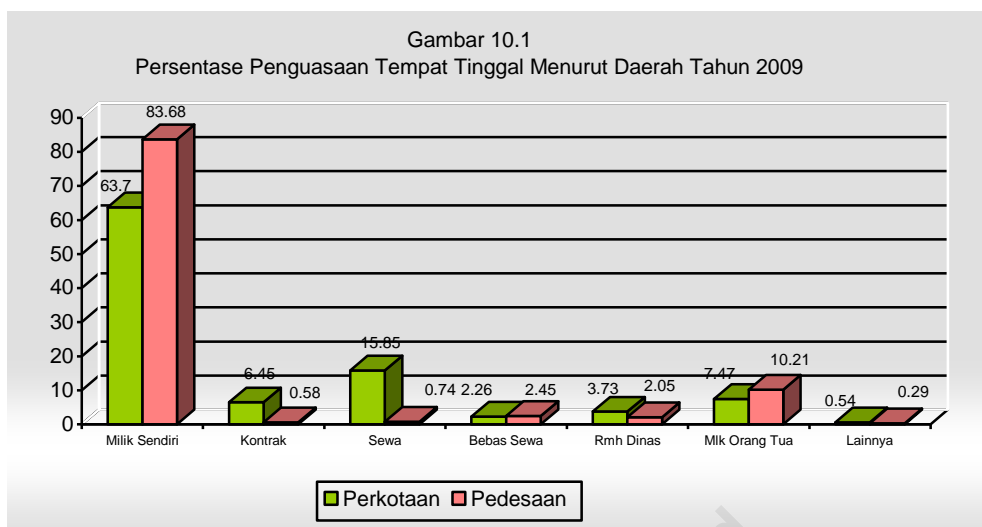
Kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan perumahan dan pemukiman. Menurut hasil Susenas 2009 secara umum rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 77,07 persen, sisanya 22,93 persen rumah tangga menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 9,30 persen menempati rumah milik orang tua, sewa 5,74 persen, rumah dinas 2,60 persen, kontrak 2,52 persen, bebas sewa 2,38 persen dan lainnya 0,38 persen. Selama delapan tahun terakhir persentase rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri relative tidak berubah yaitu sekitar 20 persen.

Tabel 10.1. Persentase Rumahtangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, Tahun 2009

Status Penguasaan Tempat Tinggal	2009
(1)	(2)
Milik Sendiri	77,07
Kontrak	2,52
Sewa	5,74
Bebas Sewa	2,38
Rumah Dinas	2,60
Milik Orang Tua	9,30
Lainnya	0,38
Jumlah	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2009 Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 10.1 menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Keadaan ini menggambarkan bahwa rumah tangga di perkotaan lebih banyak yang mengontrak atau menyewa rumah. Hal ini berkaitan dengan daya tarik perkotaan yaitu banyak penduduk yang pindah untuk bekerja di daerah perkotaan dan juga harga jual rumah di perkotaan yang jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan di pedesaan menyebabkan banyak penduduk perkotaan yang terpaksa menempati rumah bukan milik sendiri.



Sumber : BPS, Susenas 2009 Provinsi Kalimantan Tengah

10.1.2. Luas Rumah

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas dimana penghuninya tidak berdesakan sehingga dapat merasakan udara yang segar. Rumah dikatakan ideal apabila luas bangunannya sebanding dengan jumlah penghuninya, menurut ukuran baku adalah 6 m² setiap penghuni. Dengan rata-rata anggota rumahtangga tahun 2009 sebanyak 3,78 per rumahtangga, maka rata-rata luas rumah cukup memadai adalah 24 m² atau lebih. Hasil Susenas 2009 menunjukkan bahwa rata-rata rumahtangga di Kalimantan Tengah telah menghuni rumah yang cukup memadai luasnya. Hal ini terlihat dimana hanya 3,03 persen rumahtangga yang menghuni rumah dengan luas kurang dari 20 m² sedangkan 96,97 persen rumahtangga yang menghuni rumah dengan luas diatas 20 m². Persentase terbesar rumahtangga menghuni rumah dengan luas lantai 20-49 m² sebesar 51,78. Pada Tabel 10.2 berikut terlihat persentase rumahtangga menurut luas lantai rumah tahun 2003 – 2009.

Tabel 10.2. Presentase Rumah Tangga menurut luas lantai rumah yang dikuasai Tahun (2003 - 2009)

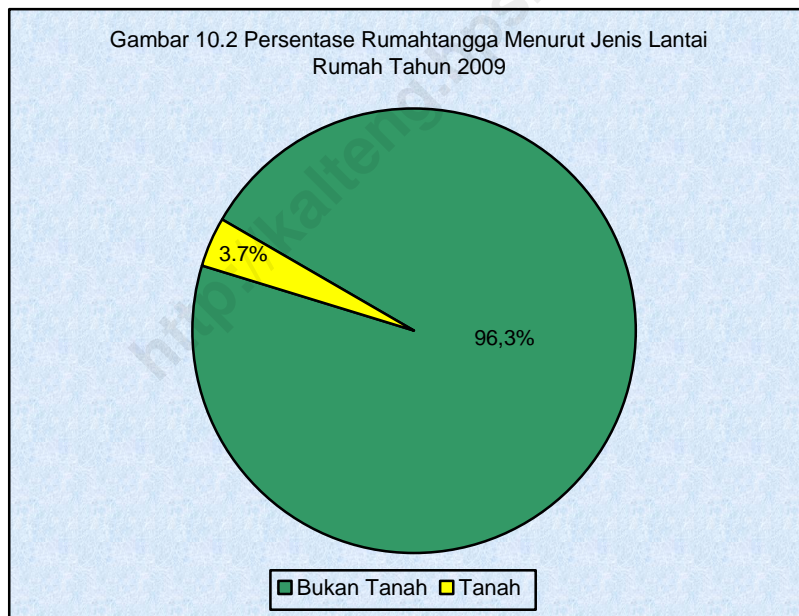
Luas lantai (m ²)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 20	2,07	1,82	4,12	2,78	4,58	5,81	3,03
20-49	48,31	47,27	45,27	53,90	50,06	47,99	51,78
50-99	43,75	44,69	43,66	38,64	39,09	38,94	38,54
100+	5,86	6,22	6,45	4,68	6,26	7,25	6,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2003 - 2009 BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Rumah yang tidak layak huni adalah rumah yang jenis lantainya dari tanah, karena lantai tanah akan berpengaruh kurang baik terhadap kesehatan penghuninya. Di Kalimantan Tengah sebagian besar lantai rumah terbuat dari bukan tanah (Marmer/Keramik, Ubin/tegel, semen/bata merah dan kayu) sebesar 96,30 persen ditahun 2009. Dari persentase sebesar itu diperkirakan lantai kayu yang terbanyak, hal itu berkaitan erat dengan budaya dan kebiasaan penduduk Kalimantan Tengah yang turun temurun dengan rumah panggung yang lantainya terbuat dari kayu, yang didukung dengan sumber daya alam Kalimantan Tengah masih kaya akan kayu. Sementara rumah yang lantainya terbuat dari tanah relatif kecil berkisar 3,70 persen.

Tabel 10.3 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Lantai Rumah Terluas Tahun 2002 – 2009

Jenis Lantai	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bukan Tanah	96,67	96,59	96,39	94,84	96,23	96,65	96,30
Tanah	3,33	3,41	3,61	5,16	3,77	3,35	3,70
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



10.1.3. Atap dan Dinding Rumah

Seperti halnya lantai rumah, atap dan dinding rumah sebagian besar menggunakan kayu. Bahkan tidak jarang dijumpai rumah dengan lantai keramik dan dinding tembok namun masih menggunakan kayu sebagai atapnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah terbiasa menggunakan kayu sebagai atap rumah. Disamping itu telah terbukti bahwa atap dari kayu cukup tahan lama dan tidak mudah pecah.

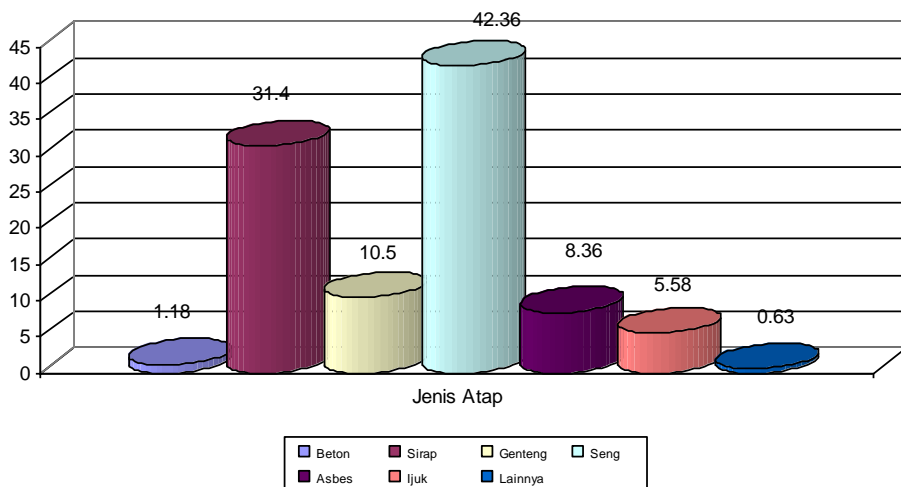
Namun dari data pada Tabel 10.4 terjadi kecenderungan menurun terhadap penggunaan kayu sebagai atap rumah dan peningkatan penggunaan genteng dan seng / asbes dalam kurun waktu 2001 – 2009. Ini merupakan akibat dari semakin sulitnya memperoleh kayu sebagai bahan untuk atap rumah, sehingga harganya pun semakin meningkat. Jika pada tahun 2001 rumahtangga yang menggunakan kayu sebagai atap rumah sebesar 49,78 persen, maka pada tahun 2009 menurun menjadi 31,40 persen. Hal sebaliknya terjadi pada bahan atap rumah dari seng, asbes dan genteng yang justru mengalami peningkatan dalam penggunaannya dimana pada tahun 2001 rumahtangga yang menggunakan genteng sebagai atap rumah sebesar 7,99 persen, 28,64 persen seng dan 2,85 persen asbes, sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi 10,50 persen untuk genteng, 42,36 persen untuk seng dan 8,36 persen untuk asbes. Sementara itu rumahtangga yang menggunakan atap rumah yang kurang layak (ijuk, daun - daunan dan lainnya) pada tahun 2009 adalah sebesar 5,58 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2001 dimana rumahtangga yang menggunakan ijuk, daun-daunan dan lainnya 6,93 persen.

Tabel 10.4. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas, 2001 - 2009

Jenis Atap	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Beton	0,46	0,66	0,70	0,75	0,59	0,23	0,68	1,18
Sirap	49,78	48,29	51,27	52,57	41,29	38,40	33,60	31,40
Genteng	7,99	6,94	7,32	7,30	8,41	8,06	10,18	10,50
Seng	28,64	29,31	31,03	28,78	36,72	39,02	41,06	42,36
Asbes	2,85	4,73	2,38	3,69	5,56	6,44	6,08	8,36
Ijuk/rumbia	6,93	9,56	6,53	6,42	7,26	7,20	7,91	5,58
Lainnya	3,34	0,51	0,78	0,49	0,17	0,65	0,49	0,63
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

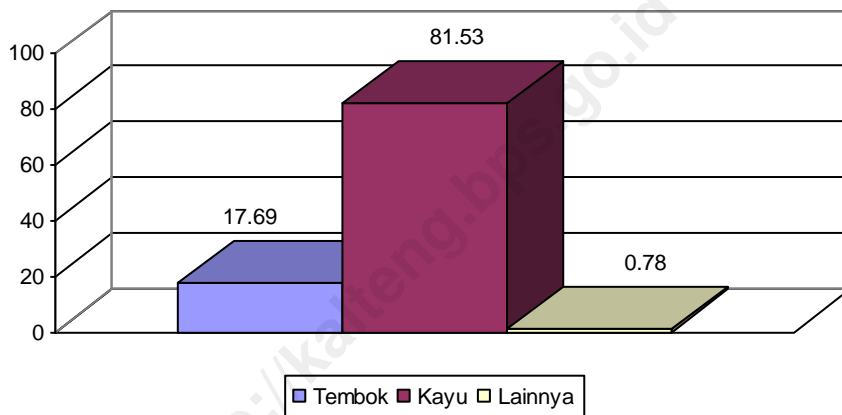
Sumber :Susenas (2001 - 2009 Provinsi Kalimantan Tengah)

Gambar 10.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Tahun 2009



Dinding rumah dikatakan layak apabila dinding rumah tersebut permanen, yaitu yang terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama seperti tembok dan kayu dan dapat melindungi penghuni rumah dari cuaca diluar rumah. Pada tahun 2009 persentase rumahtangga yang telah menggunakan dinding rumah yang permanen sebesar 99,22 persen. Sebagian besar dari rumahtangga tersebut menggunakan kayu sebagai dinding rumah, yaitu sebesar 81,53 persen. Sebaliknya rumah tangga yang menggunakan tembok sebagai dinding rumah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 17,69 persen pada tahun 2009. Sedangkan sisanya 0,78 persen rumahtangga yang masih menggunakan dinding rumah yang tidak permanen (bambu dan lainnya). Ini menggambarkan bahwa ternyata perbaikan perumahan menjadi salah satu prioritas utama masyarakat, mengingat fungsinya yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 10.4. Persentase Jenis Dinding Terluas



Tabel 10.5 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Rumah Terluas, Tahun 2003 – 2009

Jenis Dinding terluas	2003	2004	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tembok	11,78	11,89	13,02	12,17	15,90	17,69
Kayu	87,52	86,82	86,24	87,23	83,22	81,53
Lainnya	0,70	1,29	0,74	0,61	0,88	0,78
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Susenas 2003-2009 Provinsi Kalimantan Tengah

10.2. Fasilitas Perumahan

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal, dan juga menentukan tingkat kualitasnya. Fasilitas rumah tinggal ini juga berhubungan dengan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih dan jamban dengan tangki septik.

10.2.1. Sumber Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum merupakan hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri. Rumahtangga di Kalimantan Tengah yang tidak ada fasilitas air minum yaitu tahun 2009 sekitar 19,08 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu 51,79 persen, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air bersih bagi kesehatan.

Tabel 10.6 Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Air Minum, 2003 - 2009

Fasilitas Air Minum	2003	2004	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sendiri	38,43	36,63	46,47	41,88	49,77	47,55
Bersama	10,84	8,08	15,34	15,01	15,80	17,62
Umum	1,82	3,49	12,92	7,68	12,17	15,75
Tidak ada	48,91	51,79	25,26	35,43	22,27	19,08
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2003 - 2009 Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, sebagian besar rumahtangga masih mengandalkan air sungai sebagai sumber air dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, memasak maupun untuk air minum.. Rumahtangga yang menggunakan leding sebagai sumber air pada tahun 2009 hanya mencapai 15,95 persen, namun terjadi peningkatan dibandingkan tahun yang lalu. Yang menarik adalah konsumsi air dalam kemasan terlihat semakin tahun semakin meningkat yaitu tahun 2003 hanya 0,52 persen naik terus sehingga pada tahun 2009 menjadi 1,04 persen. Hal ini diperkirakan semakin banyaknya tersedia air dalam kemasan yang dipasarkan yang disertai dengan promosi-promosi untuk memperkenalkan produk yang masih dianggap baru tersebut.

Tabel 10.7. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum yang Dipergunakan di Kalimantan Tengah Tahun 2003- 2009

Sumber Air Minum	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Air Dalam Kemasan	0,52	0,50	0,98	1,09	2,39	0,92	1,04
Air Isi Ulang	-	-	-	-	-	4,45	5,76
Leding	16,52	16,29	17,63	17,01	15,70	14,66	15,95
Pompa	11,87	10,70	9,43	10,55	13,42	14,14	13,62
Sumur Terlindung	15,12	16,85	18,31	19,69	12,90	13,01	12,39
Sumur Tak Terlindung	8,73	7,14	7,28	7,52	8,29	10,54	10,17
Mata Air Terlindung	2,09	0,47	2,68	0,69	1,34	1,00	0,62
Mata AirTak Terlindung	0,71	0,80	0,53	0,56	1,59	0,63	0,51
Air Sungai	37,47	41,46	37,94	37,56	35,70	32,86	33,82
Air Hujan	6,96	5,75	4,83	5,20	8,49	7,44	5,81
Lainnya	0,00	0,04	0,40	0,12	0,19	0,35	0,31
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2003 -2009, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

10.2.2. Sumber Penerangan

Beberapa macam sumber penerangan menurut Susenas adalah Listrik, Petromak/Aladin, Pelita Sentir dan lainnya. Suatu rumah dikatakan sehat dan nyaman apabila sumber penerangan yang digunakan adalah listrik. Oleh karena itu program listrik masuk desa sampai saat ini terus digalakkan oleh pemerintah khususnya di Kalimantan Tengah, baik Listrik PLN maupun Listrik Non PLN.

Tabel 10.8. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan, 2002 – 2009

Sumber Penerangan	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Listrik	63,46	66,37	67,31	69,20	75,09	75,16	77,05
Petromak/Aladin	4,13	5,11	4,29	8,41	1,22	3,65	5,34
Pelita Sentir	31,29	28,46	28,14	21,99	23,58	20,39	16,99
Lainnya	1,12	0,06	0,27	0,41	0,11	0,79	0,61
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Susenas 2002 – 2009 Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil Susenas 2009 dalam Tabel 10.8 menunjukkan bahwa rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan cukup besar (77,05 persen). Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya telah

mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, dimana pada tahun 2002 rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan hanya 63,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa listrik tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi sudah menjangkau ke daerah perdesaan. Lokasi yang sangat jauh dari sumber listrik menjadi kendala utama. Pada umumnya mereka menggunakan petromak/ aladin, pelita sentir dan lainnya sebagai sumber penerangan.

10.2.3. Tempat Buang Air Besar (Jamban/Kakus)

Fasilitas perumahan yang tidak kalah pentingnya adalah tempat buang air besar atau jamban/kakus. Fasilitas jamban/kakus yang memenuhi syarat kesehatan adalah jamban/ kakus dengan tangki septik. Keadaan jamban keluarga sangat erat hubungannya dengan kesehatan keluarga itu sendiri. Dengan demikian tersedianya fasilitas ini menandakan status dan kondisi tempat tinggal memenuhi syarat kesehatan lingkungan.

Tabel 10.9. Persentase Rumah tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar, Tahun 2002 - 2009

Fasilitas Buang Air Besar	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sendiri	49,18	55,84	54,18	52,54	49,48	50,25	53,29	54,05
Bersama	11,63	9,31	16,01	12,57	15,65	14,21	16,21	16,36
Umum	7,96	6,52	8,11	5,90	7,18	8,23	8,91	9,78
Tidak Ada	31,24	28,33	21,70	28,99	27,20	25,91	21,58	19,82
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2002 - 2009 Provinsi Kalimantan Tengah

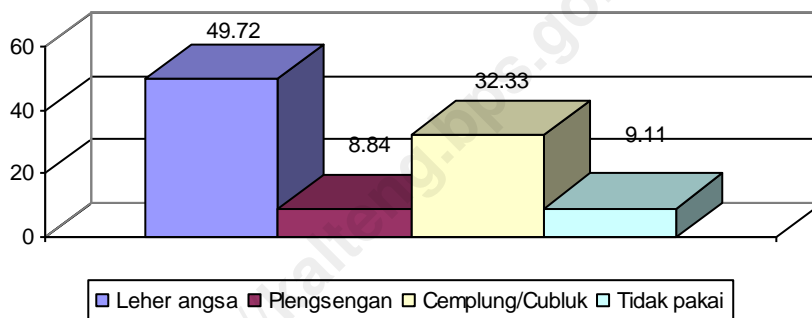
Pada tahun 2009 persentase rumah tangga yang telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri sudah cukup besar, yaitu 54,05 persen, sedangkan fasilitas buang air besar bersama dan umum sebesar 26,14 persen dan yang tidak ada fasilitas buang air besar sebesar 19,82 persen (Tabel 10.9). Sementara itu rumah tangga yang menggunakan jamban leher angsa yaitu 49,72 persen, plengsengan 8,84 persen dan cubluk/cemplung 32,33 persen. dan tidak pakai 9,11 persen. Persentase terbesar adalah rumah tangga yang masih menggunakan jenis kloset leher angsa yaitu 49,40 persen (Tabel 10.10.). Sementara itu rumah tangga yang telah menggunakan tangki septik sebagai tempat penampungan tinja/kotoran adalah 27,23 persen, Kolam/sawah 1,08 persen, sungai/danau/rawa 41,77 persen, lobang tanah 28,54 persen dan pantai/kebun serta lainnya 1,38 persen. Persentase tempat pembuangan tinja terbesar masih di sungai/danau/rawa yaitu 41,77 persen hal ini terjadi karena wilayah pemukiman di Kalimantan Tengah sebagian besar di tepian sungai/danau/rawa (Tabel 10.11.).

Tabel 10.10. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Kloset, 2002 – 2009

Jenis Kloset	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Leher Angsa	41,67	40,16	54,18	43,78	49,40	47,39	49,72
Plengsengan	9,35	21,10	16,01	15,32	7,35	9,94	8,84
Cubluk/Cemplung	31,09	24,10	8,11	29,62	29,09	26,08	32,33
Tidak Pakai	17,90	14,63	21,70	11,29	14,16	16,59	9,11
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2002 - 2009 Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 10.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset



Tabel 10.11. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Tinja Tahun 2008-2009

Tempat Pembuangan Tinja	2008	2009
(1)	(2)	(3)
Tangki/SPAL	23,75	27,23
Kolam/Sawah	0,35	1,08
Sungai/danau/laut	45,40	41,77
Lobang Tanah	28,19	28,54
Pantai/Tanah lapang/kebun	1,64	1,12
Lainnya	0,66	0,26
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2008-2009 Provinsi Kalimantan Tengah

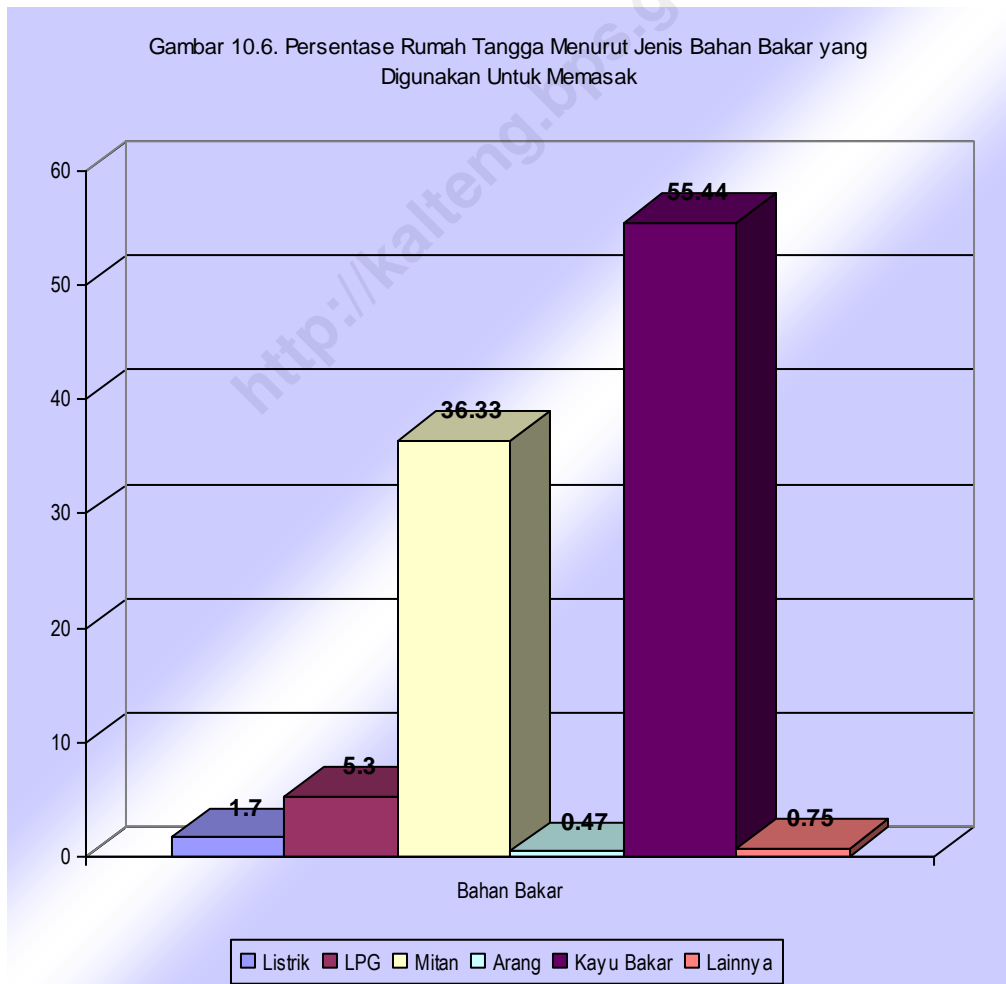
Melihat dari geografisnya Kalimantan Tengah masih banyak terbentang hutan yang merupakan penghasil kayu, sehingga 55,44 persen rumah tangga menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak, selain itu juga disebabkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak tanah dan juga harganya mahal. Meski demikian masih ada 36,33 persen rumah tangga yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Rumah tangga yang menggunakan gas elpiji untuk memasak hanya 5,30 persen meski pemerintah telah mengumumkan untuk

mengganti minyak tanah ke gas elpiji sebagai bahan bakar, hal ini disebabkan selain kurangnya pengetahuan tentang gas elpiji juga mahalnya harga dan sulit mendapatkan gas elpiji.

Tabel 10.12. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar/Energi Untuk Memasak Tahun 2009

Bahan Bakar/Energi Untuk Memasak	2009
(1)	(2)
Listrik	1,70
Gas LPG	5,30
Minyak Tanah	36,33
Arang/Briket	0,47
Kayu Bakar	55,44
Lainnya	0,75
Tidak Memasak	0,02
Jumlah	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2009



BAB XI KEMISKINAN

11.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2000 - 2008

Selama 2000-2005 di Kalimantan Tengah jumlah penduduk miskin menurun sebesar 61.317 orang dari 292.118 orang pada tahun 2000 menjadi 230.801 orang pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 16,31 persen pada tahun 2000 menjadi 10,73 persen pada tahun 2005.

Namun pada tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang signifikan menjadi 257.089 atau 13,42 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Pada bulan Maret 2007, terjadi penurunan kembali jumlah penduduk miskin, yaitu menjadi 210.327 (9,38 persen) dan pada bulan Maret 2008 menjadi 199.991 orang terdiri dari penduduk miskin kota sebesar 45.345 orang dan pedesaan 154.646 orang.

Penurunan persentase penduduk miskin selama Maret 2007-Maret 2008 terjadi karena menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT) dari 5,11 persen di Februari 2007 menjadi 4,79 persen di bulan Februari 2008.

Tabel 11.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah Menurut Daerah, 2000-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Kalimantan Tengah (ribu)						
2000			292,1			16,31
2002			231,4			11,93
2004	33,0	161,1	194,1	6,13	12,20	10,44
2005	48,5	182,4	230,8	6,62	12,84	10,73
2006	54,1	203,0	257,1	6,96	13,41	13,42
2007	51,2	159,2	210,3	6,72	10,76	9,38
2008	45,3	154,6	200,0	5,81	10,20	8,71
2009	35,78	130,08	165,85	4,45	8,34	7,02
2010	33,23	130,99	164,22	4,03	8,19	6,77

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000-2010

11.1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2009 - Maret 2010

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2010 sebesar 164,22 ribu orang (6,77 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 165,85 ribu orang (7,02

persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 1.630 orang. Selama periode Maret 2009 - Maret 2010 persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih tajam dari pada daerah pedesaan, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 2.550 ribu orang (7,13 persen), dan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan malah meningkat 910 orang (0,7 persen) lihat Tabel 11.1.

11.1.2 Perubahan Garis Kemiskinan Juli 2005 - Maret 2010

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Tabel 11.2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Juli 2005-Maret 2010

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribuan)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
<u>Perkotaan</u>					
Juli 2005	129.068	32.163	161.231	48,5	6,62
Maret 2007	128.326	41.182	179.418	51,2	6,72
Maret 2008	152.258	44.095	196.354	45,3	5,81
Maret 2009	161.654	47.663	209.317	35,78	4,45
Maret 2010	170.973	49.685	220.658	33,23	4,03
<u>Perdesaan</u>					
Juli 2005	104.828	21.152	125.980	182,4	12,84
Maret 2007	127.294	21.136	152.430	159,2	10,76
Maret 2008	149.908	30.762	180.671	154,6	10,20
Maret 2009	164.763	34.394	199.157	130,08	8,34
Maret 2010	176.147	36.643	212.790	130,99	8,19
<u>Kota+Desa</u>					
Juli 2005	111.999	24.310	136.309	230,8	10,73
Maret 2007	131.014	31.251	162.266	210,3	9,38
Maret 2008	150.707	35.296	186.003	200,0	8,71
Maret 2009	163.706	38.906	202.612	165,85	7,02
Maret 2010	174.388	41.077	215.466	164,22	6,77

Sumber: Diolah dari data Susenas Juli 2005 dan Susenas Panel Maret 2007-2010

Tabel 11.2 menunjukkan bahwa selama Maret 2009 - Maret 2010, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,34 persen, yaitu dari Rp.202.612,- per kapita per bulan pada Maret 2009 menjadi Rp.215.466,- per kapita per bulan pada Maret 2010. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh

lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2010, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 80,94 persen.

11.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi adanya dimensi lain yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan tentang program kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2009 - Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) relatif lebih baik dari 1,03 menjadi 1,02. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan kecenderungan naik dari 0,22 menjadi 0,24 pada periode yang sama (Tabel 11.3). Penurunan indeks ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit.

Tabel 11.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kalimantan Tengah Menurut Daerah, Juli 2005- Maret 2010

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</u>			
Juli 2005	1,23	1,90	1,70
Maret 2007	0,98	2,04	1,68
Maret 2008	0,90	1,76	1,47
Maret 2009	0,62	1,24	1,03
Maret 2010	0,86	1,10	1,02
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</u>			
Juli 2005	0,32	0,50	0,45
Maret 2007	0,38	0,57	0,51
Maret 2008	0,19	0,46	0,37
Maret 2009	0,13	0,27	0,22
Maret 2010	0,24	0,24	0,24

Sumber: Diolah dari data Susenas Juli 2005 dan Susenas Panel Maret 2007-2010

Untuk tahun 2010, bila dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), pada bulan Maret 2010 P_1 untuk perkotaan hanya 0,86 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,10. Sedangkan P_2 untuk perkotaan dan perdesaan memiliki nilai yang sama. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada daerah perkotaan.